LAPORAN KINERJA KEPALA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) KECAMATAN BAGOR

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BAGOR

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami munajatkan kehadlirat Allah SWT atas terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bagor Tahun 2025. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2025 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Bagor Tahun 2025 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Bagor dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Bagor. Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

CAMAT BAGOR

SUWARNO, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690115 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum
b. Maksud dan Tujuan
c. Landasan Hukum
d. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
e. Isu-isu Strategis *(Strategic Issued)* yang sedang dihadapi Organisasi
f. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

a. Ikhtisar / Ringkasan Renstra/Renja
b. Perjanjian Kinerja pada Tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

A. 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025;

A. 2. Perbandingan Antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

A. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

A. 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/Kabupaten yang Berbatasn);

A. 5. Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

A. 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;

A. 7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja.

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran-lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029).
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029).
3. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA).

4. Bukti dukung kinerja lainnya yang mendukung tercapainya kinerja / *outcome* OPD baik pada level Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan *good govermance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatuperencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintahyang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LkjIP Kecamatan Bagor Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Bagor bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan *(stakeholder).*

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Bagor merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk;
b) Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan;
c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi - instansi pemerintahuntuk meningkatkan kinerjanya

1.3 LANDASAN HUKUM

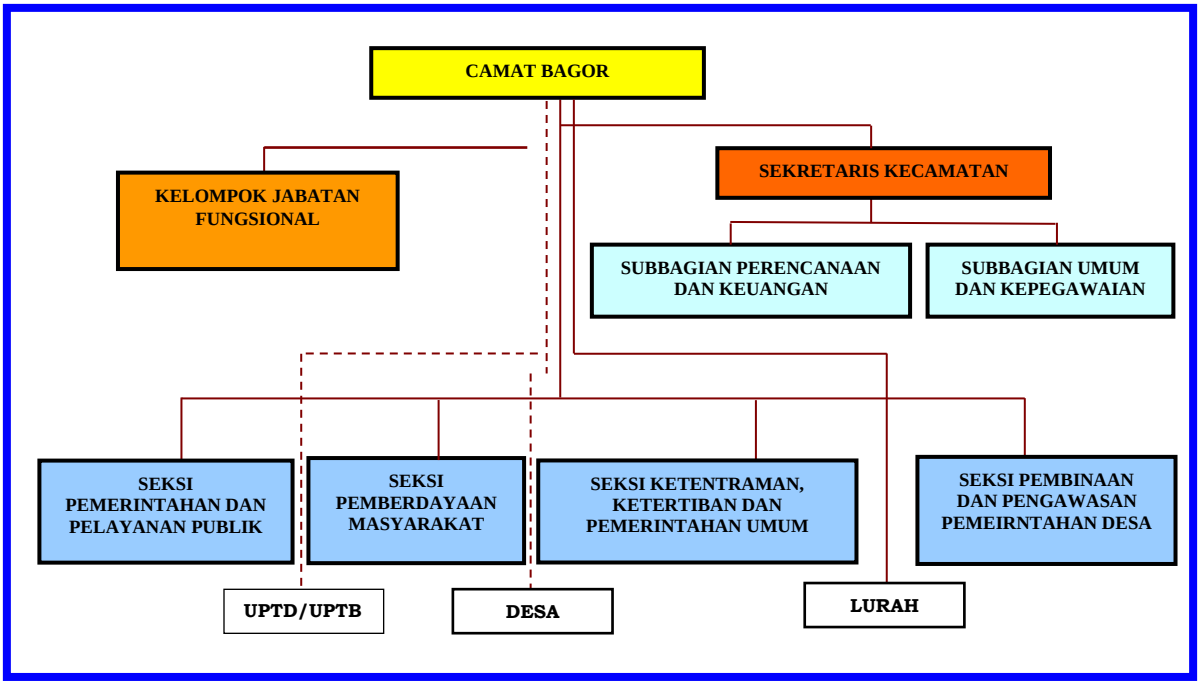
a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi;
b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
e) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

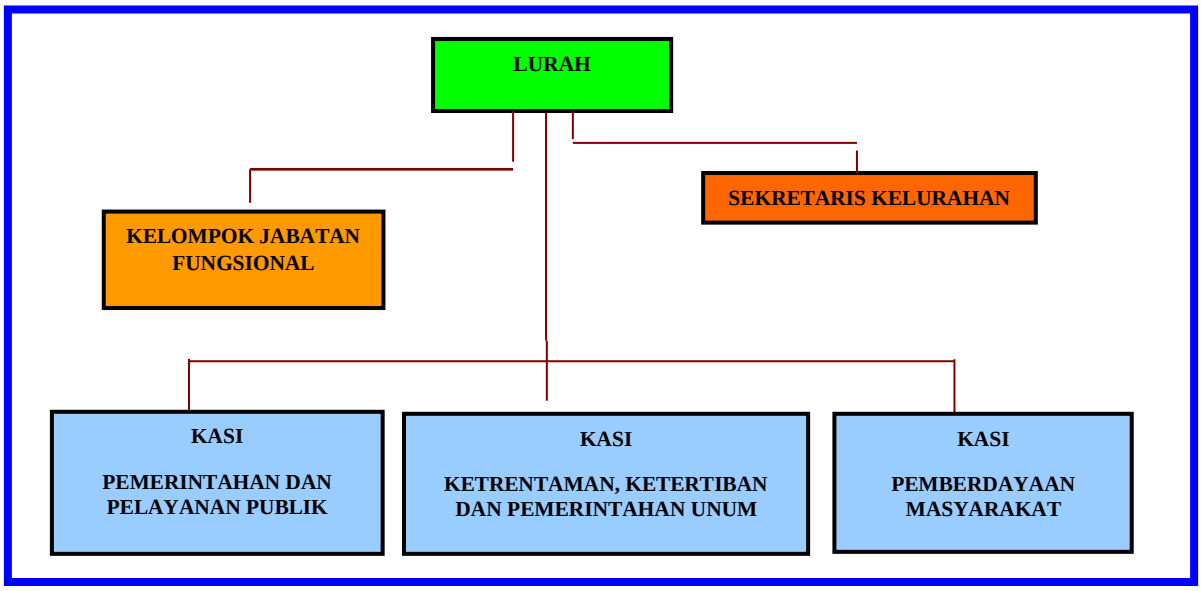
1.4 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Bagor adalah Kecamatan dengan Tipe A.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:





TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk dari Kecamatan Bagor.

1. Tugas Pokok

   Tugas pokok Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

   a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
   d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;

g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

a. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Pengordinasin pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas Melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;pelaksanaan urusan rumah tangga; dan

4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
2. Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
3. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
4. Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
5. Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
6. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

e. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;

9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
2. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
3. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
4. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
5. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
6. Melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
2. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
3. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4. Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
5. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
6. Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;

7. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
8. Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
10. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
11. Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

1. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
6. Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
7. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
8. Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
9. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
10. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
11. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
12. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
13. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
14. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan

15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Bagor adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Bagor sebanyak 12 (Dua Belas), dan belum terisi oleh pejabat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pegawai Pada Kecamatan Bagor
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

Jabatan Struktural di Kecamatan Bagor sebanyak 10 (Sepuluh)

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	0
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	0
5.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0
7.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0
8.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pem Desa	1
9.	Lurah Kedondong	1
10.	Sekretaris Lurah	0
11.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1
12.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0
13.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0
14.	Lurah Guyangan	1
15.	Sekretaris Lurah	0
16.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1
17.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	0
18.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1
Jumlah		**9**

c. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Bagor sebagai berikut :

Tabel 1.2
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Bagor
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat 1	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	2
3.	Penata Tingkat I	III/d	2
4.	Penata	III/c	2
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	3
6.	Penata Muda	III/a	2
7	Pengatur Tk.I	II/d	1
8	Pengatur	II/c	2
7.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	0
8.	Golongan Penuh Waktu	V	5
9	Golongan Paruh Waktu	V	9
Jumlah			**30**

1.5 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis sebagai berikut :

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah*. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah*. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) *Pelayanan Prima*. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu

memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan*.

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Bagor guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

5) Keamanan dan Ketertiban di Wilayah

Masih tingginya angka kriminalitas dan masih rendahnya keterlibatan semua pihak baik masyarakat, polisi, dan kecamatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan menjadi faktor penting untuk menurunkan angka pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Teknik Menyimpulan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENAGNA PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU DTRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Meningkatnya Kinerja Birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan yang aspiratif dan transparan	Peningkatan ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Ketahanan terhadap peubahan iklim, kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam	Konflik Kesenjangan, ancaman lingkungan seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrem, diinformasikan dan polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi dan potensi kemerosokan ekonomi global	Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, pengembangan insfrastruktur dan digitali desa, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Pangan, pengelolaan Lingkungan, pencegahan dan penanganan stunting serta Penguatan BUMDes yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Insfrastruktur antarwilayah, penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi lokal	• Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. • Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. • Pelayanan Prima. • Peningkatan Sinergitas Kecamatan. • Keamanan dan Ketertiban di Wilayah

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum/Latar Belakang;
1.2. Maksud dan Tujuan;
1.3. Landasan Hukum;
1.4. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi;
1.5. Isu-Isu Strategis (Strategic Issued);
1.6. Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ikhtisar /Ringkasan Renstra/Renja; dan
2.2. Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi;

3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025;
3.2. Perbandingan Antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/Kabupaten yang Berbatasn);
3.5. Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
3.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;
3.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja.

A. Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Ikhtisar Rencana Strategis Organisasi

Penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025 merupakan periode krusial di mana terdapat irisan antara dokumen transisi RPD 2024–2026 dan dokumen jangka menengah baru RPJMD 2025–2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 diposisikan sebagai "Jembatan Kinerja" yang memastikan keberlanjutan layanan publik sekaligus menjadi titik nol (*baseline*) bagi visi misi Kepala Daerah terpilih.

1. Penyelarasan IKU Transisi Tahun 2025

Dalam pelaksanaannya, IKU 2025 tidak berdiri sendiri. Terdapat dua narasi penyesuaian untuk mengakomodasi perbedaan target antara dokumen RPD dan RPJMD:

- Narasi Kinerja Operasional (Berbasis RPD): Menitikberatkan pada pemenuhan target antara untuk menjaga stabilitas makro daerah pasca-pandemi dan penyelesaian mandat transisi.
- Narasi Kinerja Strategis (Berbasis RPJMD): Menitikberatkan pada penyesuaian target baru yang lebih progresif atau perubahan indikator untuk mendukung transformasi ekonomi dan digital yang menjadi fokus Bupati terpilih.

2. **Ikhtisar Perencanaan Kinerja Berbasis RPD 2024–2026**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bagor dalam 3 (tahun) tahun ke depan dapat ditetapkan.

Adapun ***Tujuan*** Kecamatan Bagor adalah *Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan*, yang diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan yaitu berupa *Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan*. Sedangkan masing-masing sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja dengan target kinerja untuk Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.1

Sasaran Strategis, Indkator dan Target Kinerja Tahun 2025

Kecamatan Bagor

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	89
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	40%

Sumber : RPD 2024-2026.

3. Ikhtisar Perencanaan Kinerja Berbasis RPJMD 2025–2029

Memasuki tahun pertama RPJMD, perencanaan kinerja tahun 2025 diperlakukan sebagai tahapan awal dan arah kebijakan, bukan sebagai target puncak.

A. Sasaran Strategis Awal RPJMD Sasaran strategis awal diletakkan pada "**Transformasi Tata Kelola dan Infrastruktur Ekonomi**". Fokusnya adalah penguatan sistem digital pemerintahan (SPBE) dan optimalisasi Kawasan Industri Nganjuk (KING) sebagai penarik investasi masa depan.

B. Indikator Fondasi (*Baseline & Early Achievement*) Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur kekuatan awal (*starting point*) bagi kepemimpinan lima tahun ke depan:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Dijadikan *baseline* untuk melihat sejauh mana responsivitas layanan publik di awal periode.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Menjadi angka fondasi untuk mengevaluasi efektivitas kemudahan investasi dan pelatihan kerja ke depan.
- Digitalisasi Desa: Menilai persentase desa yang sudah siap secara administrasi digital sebagai fondasi *Smart Village*.

Perencanaan Kinerja Berbasis RPJMD 2025-2029 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Camat Bagor Kabupaten Nganjuk melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (RPJMD 2025-2029) yang akan datang. Sebagaimana tersebut dalam

dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bagor adalah : "Meningkatkan Reformasi Birokrasi Yang Akuntabel”

Rumusan visi yang ditetapkan dapat ditelaah sebagai berikut :

Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, yang diukur dengan indicator dengan Indikator Kinerja yaitu berupa Indeks Sinergitas Penyelnggaraan Pemerintahan Kecamatan.

b. Misi

Misi didalam RPJMD 2025-2029 yang akan di tunjang realisasinya dalam Tujuan Renstra Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk adalah Sasaran 3 (tiga) yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

   Indikator : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

   Indikator : Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
3. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa

   Indikator : Presentase Desa Tertib Administrasi Desa

Masing-masing sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja dengan target kinerja untuk Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.2

Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bagor 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	86
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	15%
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	80 %

Sumber : RPJMD 2025-2029

Indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bagor merupakan lndikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator),* yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen Renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk 2024-2026 dengan mengambil target Tahun 2025.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Bagor Tahun 2025 disusun berdasar RPD 2024-2026 berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bagor

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	89
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	40%

Sumber : RPD 2024-2026.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bagor Tahun 2025 disusun berdasar RPJMD 2025-2029 berdasar Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan;
3. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa.

Tabel 2.2
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bagor 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	86
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	15%
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	80 %

Sumber : RPJMD 2025-2029

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Bagor merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Bagor untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Bagor Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja *(performance plan)* yang diinginkan dengan realisasi kinerja *(performance result)* yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (relevan), dan *timebound* (memiliki batas waktu).

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Bagor menetapkan kriteria ketercapaian sasaran strategis perangkat daerah dengan interval nilai capaian sebagai berikut :

No	Interval Nilai Capaian	Kriteria
1	≥ 91%	Tercapai
2	80% ≥ 90%	Tercapai dengan catatan
3	< 80%	Tidak Tercapai

Capaian kinerja Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.1
Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Dokumen Perencanaan**	**Target 2025**	**Realisasi 2025**	**Capaian (%)**
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	89	87,69	98%
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Re nstra 2024-2026	40%	62,5%	156%
Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	75	79.70	106%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	86	86.17	100,2%
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Renstra 2025-2029	15%	37.5%	250%
Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	80 %	100%	125%

Berdasarkan data pada Tabel 3.1.1 Realisasi Kinerja Tahun 2025, berikut adalah analisis mendalam mengenai capaian kinerja organisasi tersebut. Analisis ini membagi evaluasi menjadi dua perspektif perencanaan, yaitu berdasarkan RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029 *(Baseline).*

1. Analisis Capaian Berdasarkan RPD 2024-2026

Pada segmen ini, kinerja menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi, meskipun belum ada yang mencapai 100%.

- **Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN):** Indikator sasaran mencapai angka 98%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang berjalan sudah sangat stabil dan mendekati target ideal. Selisih angka riil (87,69 dari target 89) sangat tipis, yang menandakan manajemen operasional di kecamatan sudah berjalan sesuai rill. Berikut unsur penilaian ESukma Jatim:
    1. Persyaratan (86,11)
    2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur (84,58)
    3. Waktu Penyelesaian (82,92)
    4. Biaya / Tarif (95,83)
    5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (83,75)
    6. Kompetensi Pelaksanaan (86,11)
    7. Perilaku Pelaksana (87,92)
    8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (96,94)
    9. Sarana dan Prasaran (85)
- **Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.** Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan menunjukkan peningkatan performa yang signifikan pada tahun 2025. Setelah pada tahun 2024 realisasi penurunan pelanggaran tercatat sebesar 27%, pada tahun 2025 angka tersebut meningkat menjadi 62,50% dari target 40%.

  Berikut Kejadian Tahun lalu (2024):
    1. Pengamanan Malam Takbiran/hari raya idul fitri tahun 2024;
    2. Pengamanan Silaturahmi perguruan silat IPSI di Pesudukuh;
    3. Pengamanan penertiban jam malam di tempat hiburan;
    4. Pengamanan penertiban banner tanpa ijin;
    5. Pengamanan dan Penertiban pembuangan sampah;
    6. Pengamanan Pileg dan Pilpres tahun 2024;
    7. Pengamanan apel cipta kondisi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden;

8. Pengamanan apel gelar pasuka dalam rangkapengamanan NATARU.

Sedangkan kejadian di Bulan Januari - September Tahun (2025):

1. Gangguang Parkir sembarangan Vespa Rosok di Pom Morobau Desa Kerepkidul menjelang Hari Raya Idul Fitri;
2. Berkendara yang meresahkan warga sekitar wilayah Kec Bagor di Jalan Raya Madiun-Surabaya;
3. Peredaran Minuman beralkohol di Kalangan Remaja;

Dengan rumusan analisis capaian sasaran sebagai berikut:

Jumlah Kasus tahun lalu – Jumlah Kasus tahun ini
----------x 100 %
Jumlah Kasus tahun lalu

8-3
= -------- X 100 %
8
= 62,5 %

2. Analisis Capaian Berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Baseline)

Penilaian berdasarkan baseline RPJMD menunjukkan hasil yang lebih fluktuatif karena berfungsi sebagai titik awal pengukuran jangka menengah yang baru. Pada segmen ini, kinerja menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi.

- **Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan :**

  Indikator Tujuan mencapai angka 106%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang. Capaian sebesar 106% Realisasi melampaui target baseline, tim berhasil melakukan akselerasi kinerja di awal tahun periode RPJMD. Berikut Aspek penilaian Sinergitas :

  1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Bobot 10 dengan data kinerja 7,54
  2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 10 dengan data kinerja 9
  3. Pelaksanaan Tugas Delegatif 10 dengan data kinerja 9
  4. Penyelenggaraan Tugas Atributif 30 dengan data kinerja 20.96
  5. Inovasi/Kreatifitas Kecamatan pada segala aspek penilaian 27 dengan data kinerja 21,6
  6. Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan 8 dengan data kinerja 8
  7. Pelaksabaan Tugas Lainnya 5 dengan data kinerja 3,6.

- **Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN):**

  Indikator sasaran mencapai angka 100,2%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang berjalan sudah sangat stabil dan mencapai target ideal. Selisih angka riil (86.17 dari target

86) sangat tipis, yang menandakan manajemen operasional di kecamatan sudah berjalan sesuai rill dan tim berhasil melakukan akselerasi kinerja di awal tahun periode RPJMD. Berikut unsur penilaian E-Sukma Jatim:

1. Persyaratan 84,56
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 84,36
3. Waktu Penyelesaian 82,11
4. Biaya / Tarif 97,39
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 83,23
6. Kompetensi Pelaksanaan 84,85
7. Perilaku Pelaksana 86,71
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 97,46
9. Sarana dan Prasarana 82,72

- **Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.** Indikator sasaran penurunan pelanggaran mencapai 250%. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan menunjukkan peningkatan performa yang signifikan pada tahun 2025. Setelah pada tahun 2024 realisasi penurunan pelanggaran tercatat sebesar 27%, pada tahun 2025 angka tersebut meningkat menjadi 37,50%. (realisasi 37.50% dari target 15%).

  Berikut Kejadian Tahun lalu (2024):

  1. Pengamanan Malam Takbiran/hari raya idul fitri tahun 2024;
  2. Pengamanan Silaturahmi perguruan silat IPSI di Pesudukuh;
  3. Pengamanan penertiban jam malam di tempat hiburan;
  4. Pengamanan penertiban banner tanpa ijin;
  5. Pengamanan dan Penertiban pembuangan sampah;
  6. Pengamanan Pileg dan Pilpres tahun 2024;
  7. Pengamanan apel cipta kondisi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden;
  8. Pengamanan apel gelar pasukan dalan rangkat pengamanan NATARU.

  Sedangkan kejadian di Tahun Sekarang (2025) :

  1. Gangguang Parkir sembarangan Vespa Rosok di Pom Morobau Desa Kerepkidul menjelang Hari Raya Idul Fitri;
  2. Berkendara yang meresahkan warga sekitar wilayah Kec Bagor di Jalan Raya Madiun-Surabaya;
  3. Peredaran Minuman beralkohol di Kalangan Remaja;

4. Perselisihan Pemakaman warga Desa Mungkung dengan Warga Desa Gemenggeng;
5. Sabung Ayam Dusun Sugihwaras Desa Sugihwaras.

Dengan rumusan analisis capaian sasaran sebagai berikut:

Jumlah Kasus tahun lalu – Jumlah Kasus tahun ini
----------x 100 %
Jumlah Kasus tahun lalu

$$= \frac{8-5}{8} \times 100\ \% = 37.5\ \%$$

- **Meningkatnya Tertib Administrasi Desa** Indikator sasaran Presentase Desa Tertib Administrasi Desa mencapai target sempurna 125%. Ini menunjukkan pembinaan terhadap desa telah mencapai standar yang ditetapkan secara konsisten, capaian ini berjalan sudah sangat stabil dan mencapai target ideal di kategori RPJMD. Metode pengumpulan data dengan memberikan format pengisian laporan administrasi desa kepada Desa yang nantinya diupload di *google drive* Kecamatan. Adapun jenis-jenis buku administrasi Desa :

I. Buku Administrasi Umum
1. Buku Peraturan di Desa
2. Buku Keputusan Kepala Desa
3. Buku Inventarisasi dan Kekayaan Desa
4. Buku Aparat Pemerintahan Desa
5. Buku Tanah Kas Desa
6. Buku Tanah di Desa
7. Buku Agenda
8. Buku Ekspedisi
9. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa

II. Buku Administrasi Penduduk
1. Buku Induk Penduduk
2. Buku Mutasi Penduduk Desa
3. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk
4. Buku Penduduk Sementara
5. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga

III. Buku Administrasi Keuangan

1. Buku APB Desa
2. Buku Rencana Anggaran Biaya
3. Buku Kas Pembantu Kegiatan
4. Buku Kas Umum
5. Buku Kas Pembantu
6. Buku Bank Desa

IV. Buku Administrasi Pembangunan

1. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa
2. Buku Kegiatan Pembangunan
3. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan
4. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat

V. Buku Administrasi Lainnya

1. Kegiatan BPD dalam buku administrasi BPD
2. Kegiatan Musyawarakt Desa dalam buku Musyawarah Desa
3. Kegiatan Lembaga Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.

Dengan rumusan analisis capaian sasaran Presentase Desa Tertib Administrasi Desa berdasarkan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{19}{19} \times 100\ \%$$

$$= 100\%$$

Dimana semua desa di Kecamatan Bagor sudah melaksanakan Tertib Administrasi Desa.

A.2. Perbandingan Realisasi Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun (2024, 2023)

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Sumber Perencanaan (RPD/RPJMD	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	85	86	88	86	83.51	84.60	85.42	87,69
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	N/A	N/A	88%	40	N/A	N/A	27%	62,50
Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	80	80	78	75	72.56	85.33	63.52	79.70
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	85	86	88	86	83.51	84.60	85.42	86.17

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2025-2029	N/A	N/A	88%	15	N/A	N/A	27	37.50
Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	N/A	N/A	N/A	80	N/A	N/A	N/A	100

Sumber : LKJIP 2022, LKJIP 2023, LKJIP 2024 dan Renstra 2025-2029.

1. Analisis Capaian Berdasarkan RPD 2024-2026

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun anggaran dengan target akhir Renstra penting untuk mengevaluasi sejauh mana langkah-langkah strategis yang telah diambil dan berhasil dalam mencapai visi dan misi organisasi. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan jangka panjang berikutnya dan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran satu adalah sebagai berikut :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada periode tahun 2022 hingga 2025, sasaran untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) menunjukkan tren perkembangan yang positif dan signifikan. Hal ini diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencerminkan persepsi publik terhadap efektivitas, kecepatan, dan transparansi layanan di tingkat Kecamatan.

Analisis Capaian Tahunan: Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi IKM menunjukkan pertumbuhan stabil di angka 83,51 dan 84,60. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan (85 dan 86), tingkat capaian kinerja tetap berada di atas 98%, yang menunjukkan upaya maksimal dalam optimalisasi standar pelayanan minimal.

Pada tahun 2024, meskipun target ditingkatkan secara ambisius menjadi 88, realisasi tetap menunjukkan kenaikan menjadi 85,42. Puncak keberhasilan kinerja tercapai pada tahun 2025, di mana realisasi sebesar 87,69 berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 86 (capaian mencapai 101,96%).

b. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Pada tahun 2022 dan 2023 tidak menampilkan indikator sasaran Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan. Terkait sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, instansi menunjukkan komitmen kuat dalam menekan angka pelanggaran di wilayah Kecamatan. Pada tahun 2024, realisasi penurunan pelanggaran tercatat sebesar 27%. Dengan Kejadian Sbb:

Berikut Kejadian Tahun lalu (2024):

1. Pengamanan Malam Takbiran/hari raya idul fitri tahun 2024;
2. Pengamanan Silaturahmi perguruan silat IPSI di Pesudukuh;
3. Pengamanan penertiban jam malam di tempat hiburan;
4. Pengamanan penertiban banner tanpa ijin;

5. Pengamanan dan Penertiban pembuangan sampah;
6. Pengamanan Pileg dan Pilpres tahun 2024;
7. Pengamanan apel cipta kondisi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden;
8. Pengamanan apel gelar pasukan dalan rangkat pengamanan NATARU.

Meskipun secara angka persentase belum memenuhi target ambisius sebesar 88%, namun angka ini menjadi fondasi penting dalam pemetaan wilayah rawan konflik 2024, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara target (88%) dan realisasi (27%). Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan pelanggaran belum mencapai angka maksimal yang diharapkan. Secara administratif, rendahnya realisasi ini bisa disebabkan oleh intensitas pengawasan yang meningkat sehingga lebih banyak pelanggaran yang terdeteksi dan tercatat.

Lonjakan Pada tahun 2025, target ditetapkan pada angka 40 (mengalami perubahan satuan/nomenklatur) dengan realisasi sebesar 62,50. Capaian ini mencapai 156,25%, yang artinya kinerja di lapangan melampaui ekspektasi perencanaan secara signifikan. Memasuki tahun 2025, terjadi peningkatan efektivitas penanganan trantibum yang sangat signifikan. Dengan target kinerja sebesar 40, instansi mampu merealisasikan angka 62,50 atau setara dengan 156,25% dari target yang ditetapkan. Lonjakan capaian ini mencerminkan keberhasilan koordinasi antara aparat kecamatan dengan unsur pengamanan kewilayahan serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan. Dengan Kejadian Sbb:

Berikut Kejadian Tahun lalu (2025):

Sedangkan kejadian di Tahun Sekarang (2025) :

1. Gangguang Parkir sembarangan Vespa Rosok di Pom Morobau Desa Kerepkidul menjelang Hari Raya Idul Fitri;
2. Berkendara yang meresahkan warga sekitar wilayah Kec Bagor di Jalan Raya Madiun-Surabaya;
3. Peredaran Minuman beralkohol di Kalangan Remaja;

2. Analisis Capaian Berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Baseline)

a. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Capaian Indeks Sinergitas Kecamatan pada periode 2022-2025 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Meskipun target tahunan diturunkan secara bertahap (dari 80 ke 75), realisasi di lapangan mengalami dinamika yang kontras antara keberhasilan tinggi dan penurunan tajam.

Analisis Fluktuasi:

- Keberhasilan 2023: Pada tahun 2023, instansi mencapai titik performa tertinggi dengan nilai 85.33. Hal ini mengindikasikan koordinasi yang sangat solid antar unit kerja maupun dengan instansi vertikal lainnya.
- Penurunan 2024: Terjadi penurunan performa yang cukup tajam menjadi 63.52. Mengingat ini adalah tahun transisi perencanaan (masuk ke Renstra baru), penurunan ini bisa dianalisis sebagai akibat dari adanya perubahan indikator penilaian, kendala koordinasi lapangan, atau fokus anggaran yang terbagi.
- Pemulihan 2025: Instansi berhasil melakukan pemulihan kinerja secara luar biasa di tahun 2025 dengan realisasi 79.70, melampaui target 75. Ini menunjukkan adanya evaluasi efektif atas kegagalan di tahun sebelumnya.

Meskipun realisasi tahun 2025 melampaui target, kenyataan bahwa realisasi (79.70) masih di bawah pencapaian tahun 2023 (85.33) menunjukkan bahwa potensi sinergitas masih bisa ditingkatkan lagi. Disarankan untuk menstandarisasi pola koordinasi agar di tahun-tahun mendatang kinerjanya lebih stabil (konsisten) dan tidak fluktuatif.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada periode tahun 2022 hingga 2025, sasaran untuk Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan menunjukkan tren perkembangan yang positif dan signifikan. Hal ini diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan yang mencerminkan persepsi publik terhadap efektivitas, kecepatan, dan transparansi layanan di tingkat Kecamatan.

Analisis Capaian Tahunan: Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi IKM menunjukkan pertumbuhan stabil di angka 83,51 dan 84,60. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan (85 dan 86), tingkat capaian kinerja tetap berada di atas 98%, yang menunjukkan upaya maksimal dalam optimalisasi standar pelayanan minimal.

Pada tahun 2024, meskipun target ditingkatkan secara ambisius menjadi 88, realisasi tetap menunjukkan kenaikan menjadi 85,42. Puncak keberhasilan kinerja tercapai pada tahun 2025, di mana realisasi sebesar 86,17 berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 86 (capaian mencapai 100,2%).

c. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Pada tahun 2022 dan 2023 tidak menampilkan indikator sasaran Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan. Terkait sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum, instansi menunjukkan komitmen kuat dalam menekan angka pelanggaran di wilayah Kecamatan. Terjadi perubahan drastis pada penetapan

target dari tahun 2024 ke 2025. Pada tahun 2024, target menggunakan satuan persentase (88%), sedangkan pada tahun 2025 menggunakan satuan persentase (15%). Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian metodologi pengukuran kinerja agar lebih realistis dan terukur sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan Kejadian Sbb:

Berikut Kejadian Tahun lalu (2024):

1. Pengamanan Malam Takbiran/hari raya idul fitri tahun 2024;
2. Pengamanan Silaturahmi perguruan silat IPSI di Pesudukuh;
3. Pengamanan penertiban jam malam di tempat hiburan;
4. Pengamanan penertiban banner tanpa ijin;
5. Pengamanan dan Penertiban pembuangan sampah;
6. Pengamanan Pileg dan Pilpres tahun 2024;
7. Pengamanan apel cipta kondisi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden;
8. Pengamanan apel gelar pasukan dalan rangkat pengamanan NATARU.

Realisasi tahun 2025 sebesar 37,50% terhadap target 15 menghasilkan capaian kinerja sebesar 250%. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan menunjukkan peningkatan performa yang signifikan pada tahun 2025. Setelah pada tahun 2024 realisasi penurunan pelanggaran tercatat sebesar 27%, pada tahun 2025 angka tersebut meningkat menjadi 37,50%. Sedangkan kejadian di Tahun Sekarang (2025) :

1. Gangguang Parkir sembarangan Vespa Rosok di Pom Morobau Desa Kerepkidul menjelang Hari Raya Idul Fitri;
2. Berkendara yang meresahkan warga sekitar wilayah Kec Bagor di Jalan Raya Madiun-Surabaya;
3. Peredaran Minuman beralkohol di Kalangan Remaja;
4. Perselisihan Pemakaman warga Desa Mungkung dengan Warga Desa Gemenggeng;
5. Sabung Ayam Dusun Sugihwaras Desa Sugihwaras.

d. **Presentase Desa Tertib Administrasi Desa**

Salah satu sasaran strategis yang menjadi fokus pada tahun anggaran 2025 adalah "Meningkatnya Tertib Administrasi Desa". Sasaran ini diukur melalui indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Desa. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, berikut adalah rincian capaiannya: Pada tahun 2025, yang merupakan tahun awal implementasi Renstra 2025-2029, target kinerja ditetapkan sebesar 80%. Adapun realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan antara realisasi terhadap target, maka persentase capaian kinerja

mencapai 125%, yang masuk dalam kategori "Sangat Berhasil". Berdasarkan data, ringkasan evaluasi capaian kinerja untuk indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Desa untuk tahun 2022 hingga 2024 berstatus N/A (dikarenakan indikator ini baru ditetapkan pada Renstra 2025-2029), analisis akan berfokus pada efektivitas pencapaian di tahun pertama periode perencanaan.

Meskipun target tahun 2025 telah tercapai secara maksimal (125%), kecamatan perlu menjaga konsistensi kualitas administrasi tersebut. Untuk tahun berikutnya, direkomendasikan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap parameter "Tertib Administrasi" agar tidak hanya mencakup kelengkapan dokumen secara kuantitas, tetapi juga kualitas dan validitas data di tingkat desa.

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Organisasi.

3.1.3.1

Target Kinerja Renstra (berdasarkan RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dasar Dokumen	Target Renstra Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	88	86	86	87	88	89
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	88	15	15	14	13	12
Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	N/A	75	75	80	83	87
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	N/A	86	86	87	88	89
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman	Renstra 2025-2029 (Baseline)	N/A	15	15	14	13	12

Kecamatan	dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan							
Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029 (Baseline)	N/A	80	80	85	90	95

Sumber : Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029.

Tabel 3.1.3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran	**Indikator Kinerja**	**Dasar Dokumen (RPD/ RPJMD)**	**Target Tahun Akhir Renstra**	**Realisasi Kinerja Tahun 2025**	**Tingkat Kemajuan (%)**
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	89	87.69	98%
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	40	62,50	156%
Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	75	79.70	106%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	86	86.17	100,2%

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	15	37.50	250%
Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029 (Baseline)	80	100	125%

Sumber : Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029.

1. Analisis Capaian Berdasarkan RPD 2024-2026

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Berdasarkan data terbaru yang Anda sampaikan, terdapat penyesuaian pada Target Tahun Akhir Renstra menjadi 89. Hal ini mengubah status capaian yang sebelumnya melampaui target menjadi hampir mencapai target. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2025 tercatat sebesar 87.69. Capaian ini menunjukkan konsistensi instansi dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Selisih capaian tersebut akan menjadi bahan evaluasi strategis, terutama dalam mengidentifikasi unsur pelayanan mana yang masih memerlukan akselerasi guna mencapai angka ideal pada periode mendatang.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2025 sebesar 86.17. Dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2030 sebesar 90 dengan tingkat kemajuan sebesar 98% yang diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\,\% = \frac{87{,}69}{89} \times 100\,\% = 98\%$$

Tingkat kemajuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 102% , maka dapat dikatakan bahwa dalam hal peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Bagor telah dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bagor melakukan peningkatan pelayanan Ceria (Cepat, Efesien dan Efektif, Ramah, Ikhlas, Akuntabel) sehingga respon baik dari masyarakat meningkat hal ini dibuktikan dengan hasil survey masyarakat melalui aplikasi E-Sukma dengan hasil baik.

Kedepan Kecamatan Bagor akan menaikkan target pelayanan publik sehingga diharapkan pelayanan di Kecamatan Bagor semakin baik.

b. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan

Target akhir Renstra ditetapkan pada angka 40, sementara realisasi yang dicapai adalah 62,50. Angka ini menunjukkan bahwa upaya penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum telah berjalan efektif dan mendekati target yang direncanakan. Tingkat kemajuan sebesar 156% dikategorikan sebagai capaian yang Tinggi/Sangat Baik.

Hasil ini menggambarkan keberhasilan langkah-langkah preventif dan penegakan peraturan di lapangan. Meskipun belum mencapai angka 100%, capaian ini merupakan indikator bahwa gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat diminimalisir secara berkelanjutan. Selisih capaian yang ada akan menjadi fokus perbaikan pada periode selanjutnya melalui penguatan deteksi dini dan perluasan kolaborasi dengan unsur pengamanan kewilayahan lainnya.

Realiasasi Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 25 % dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 11% maka tingkat kemajuannya sebesar

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\ \% = \frac{62{,}5}{15} \times 100\ \% = 156\ \%$$

2. Analisis Capaian Berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Baseline)

a. Indeks Sinergitas Kecamatan

Berdasarkan data terbaru untuk sasaran Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan, indikator ini menunjukkan performa yang Sangat Memuaskan (melampaui target). Realisasi sebesar 79.70 terhadap target 75 menghasilkan tingkat kemajuan sebesar 106%. Mengingat tahun 2025 adalah tahun awal (baseline) bagi dokumen Renstra 2025-2029, pencapaian ini menunjukkan bahwa pondasi koordinasi antar instansi di wilayah Kecamatan sudah berada di atas standar yang ditetapkan sejak awal periode. Realiasasi Indeks Sinergitas Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 106 % maka tingkat kemajuannya sebesar

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\ \% = \frac{79{,}70}{75} \times 100\ \% = 106\ \%$$

b. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan

Berdasarkan data terbaru untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan, indikator ini menunjukkan pencapaian yang sangat presisi terhadap target *baseline* yang ditetapkan. Realisasi sebesar 86.17 terhadap target 86 menghasilkan tingkat kemajuan sebesar 100,2%. Karena data ini merupakan *baseline* (tahun awal) dari perencanaan jangka menengah yang baru, pencapaian 100% ini menjadi titik awal yang sangat aman. Instansi telah membuktikan kapasitasnya dalam menjaga kualitas layanan pada level tinggi, sehingga fokus pada tahun-tahun berikutnya adalah mempertahankan konsistensi skor tersebut agar tidak mengalami penurunan (stagnasi). Sebagai tahun awal dalam implementasi Renstra 2025-2029, capaian ini menegaskan komitmen Kecamatan dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima dan responsif. Keberhasilan mencapai target *baseline* ini menjadi pondasi penting bagi penguatan kepercayaan publik dan efektivitas birokrasi di tingkat kecamatan untuk tahun-tahun mendatang. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 86.17. Dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2030 sebesar 90 dengan tingkat kemajuan sebesar100,2% yang diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\ \% = \frac{86.17}{86} \times 100\ \% = 100{,}2\%$$

c. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan

Realisasi sebesar 37.50 terhadap target 15 menghasilkan tingkat kemajuan sebesar 250%. Dalam sistem akuntabilitas kinerja, angka ini menunjukkan performa yang sangat progresif. Instansi berhasil menekan angka pelanggaran trantibum dua kali lipat lebih banyak daripada yang diproyeksikan dalam target *baseline* awal. Tingkat kemajuan 250% ini mengindikasikan bahwa strategi keamanan yang diterapkan di wilayah Kecamatan bekerja dengan sangat efektif. Hal ini biasanya didorong oleh:

- Peningkatan frekuensi patroli gabungan.
- Keberhasilan program deteksi dini gangguan ketertiban.
- Edukasi masyarakat yang berhasil menurunkan niat pelanggaran secara drastic

Realiasasi Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 250 % maka tingkat kemajuannya sebesar

Realisasi Kinerja Tahun 2025 37,5

---------- x 100 % = -------- X 100 % = 250%

Target pada akhir Renstra 15

d. Presentase Desa Tertib Administrasi Desa

Berdasarkan data tersebut untuk sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Desa, indikator ini menunjukkan pencapaian yang sangat solid dan akurat pada tahun pertama implementasi Renstra 2025-2029. Adapun target kinerja ditetapkan sebesar 80% dengan realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 100% menunjukkan bahwa program pembinaan administrasi desa oleh Kecamatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Sasaran ini diukur melalui indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Desa yang meliputi kelengkapan sebagai berikut : Buku Administrasi Umum, Buku Administrasi Penduduk, Buku Administrasi Keuangan, Buku Administrasi Pembangunan, Buku Administrasi Lainnya. Sesuai dengan analisis di awal, pencapaian 100% ini menandakan bahwa mayoritas desa sudah berada pada status tertib administrasi. Realiasasi Meningkatnya Tertib Administrasi Desa pada tahun 2025 sebesar 100 % maka tingkat kemajuannya sebesar

Realisasi Kinerja Tahun 2025 100

---------- x 100 % = -------- X 100 % = 125 %

Target pada akhir Renstra 80

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/kabupaten yang berbatasan)

Tabel 3.1.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (berdasarkan RPD 2024-2026)

Sasaran	Indikator Kinerja	Standart Jatim	Realisasi 2025	Posisi Kinerja
1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	89.23	88.17	Dibawah standard
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	-	37.50%	-

Sumber Data : Aplikasi Sukma e- Jatim *https://sukma.jatimprov.go.id/fe*

Tabel 3.1.4.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (berdasarkan RPJMD 2025-2029)

Sasaran	Indikator Kinerja	Standart Jatim	Realisasi 2025	Posisi Kinerja
1	2	3	4	5
Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	-	79.70	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	89.23	86.17	Dibawah
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	-	37.50%	
Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	-	100%	

1. **Analisis Capaian Berdasarkan RPD 2024-2026**

   a. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**

Dari table Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan RPD 2024-2026. Dengan Realisasi Tingkat Nasional/Provinsi dapat disimpulkan bahwa :

Realisasi kinerja sasaran yang pertama yaitu IKM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tahun 2025 adalah 86.17 dibandingkan dengan IKM Provinsi Jawa Timur sebesar 89.23 Kecamatan Bagor masih dibawah standart Nasional/Provinsi. Maka dapat dikatakan kinerja dalam pelayanan publik masih belum optimal. Kedepannya Kecamatan Bagor akan menaikkan target IKM sehingga harapannya Standar Pelayanan di Kecamatan Bagor mampu melebihi Standar Provinsi Jawa Timur.

   b. **Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan**

Realisasi kinerja Sasaran strategis yang kedua Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan dari tahun 2025 sebesar 62.50% jika dibandingkan dengan Standart Nasional/Provinsi tidak ada pembandingnya.

2. **Analisis Capaian Berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Baseline)**

   a. **Indeks Sinergitas Kecamatan**

Realisasi kinerja Tujuan strategis yang kedua Indeks Sinergitas Kecamatan dari tahun 2025 sebesar 106% jika dibandingkan dengan Standart Nasional/Provinsi tidak ada pembandingnya.

   b. **Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan**

Dari table Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan RPJMD 2025-2029. Dengan Realisasi Tingkat Nasional/Provinsi dapat disimpulkan bahwa Realisasi kinerja sasaran yang pertama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan tahun 2025 adalah 86.17 dibandingkan dengan IKM Provinsi Jawa Timur sebesar 89.23 Kecamatan Bagor masih dibawah standart Nasional/Provinsi. Maka dapat dikatakan kinerja dalam pelayanan publik masih belum optimal. Kedepannya Kecamatan Bagor akan menaikkan target IKM sehingga harapannya Standar Pelayanan di Kecamatan Bagor mampu melebihi Standar Provinsi Jawa Timur.

c. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan

Realisasi kinerja Sasaran strategis yang kedua Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan dari tahun 2025 sebesar 37.50% dibandingkan dengan Standart Nasional/Provinsi tidak ada pembandingnya.

d. Presentase Desa Tertib Administrasi Desa

Realisasi kinerja Sasaran strategis yang kedua Meningkatnya Tertib Administrasi Desa dari tahun 2025 sebesar 125 % dibandingkan dengan Standart Nasional/Provinsi tidak ada pembandingnya.

A.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.1.5
Analisis Keberhaslan/Kegagalan Capaian Kinerja

Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Dok Perenc.	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Pendukung atau Penghambat	Alternati Solusi
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		86	86.17	100,2%	Renstra 2024-2026 •	-
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	40	62,50	156%	Faktor Pendukung dipengaruhi oleh: • Kecamatan tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan sangat bergantung pada solidnya hubungan antara: 1. **Koordinasi Tiga Pilar:** Hubungan harmonis dan	-

						rutin antara **Camat,** 2. **Kapolsek, dan Danramil**. Pertemuan rutin (coffee morning) untuk memetakan kerawanan wilayah adalah kunci. • Faktor Partisipasi Masyarakat (Sistem Deteksi Dini) 1. Revitalisasi Siskamling/Poskamling: Aktifnya ronda malam yang berbasis gotong royong. 2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM): Adanya jaringan informan dari tokoh masyarakat/pemuda yang memberikan informasi cepat sebelum konflik membesar. 3. Pemanfaatan Grup	

						WhatsApp: Komunikasi cepat antara Ketua RT/RW dengan pihak Kecamatan/Kelurahan untuk melaporkan gangguan ketertiban secara *real-time*.	
Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	75	79.70	106%	Faktor Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja : a. Faktor Internal: Pergantian personel kunci yang mempengaruhi pola komunikasi atau sinergitas tim di tingkat Kecamatan. b. Faktor Eksternal: Adanya agenda besar (seperti Pemilu atau kegiatan nasional) di tahun 2024 yang mungkin menguras energi koordinasi sehingga skor sinergitas rutin menurun.	-
Meningkatnya	Indeks	Renstra	86	86.17	102%	Faktor Pendukung	-

Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	2025-2029 (Baseline)				dipengaruhi oleh: • Digitalisasi Layanan: Penerapan aplikasi pelayanan mandiri atau sistem antrean *online* yang memangkas waktu tunggu masyarakat di loket. • Sarana dan Prasarana yang Nyaman: Ruang tunggu yang representatif, adanya fasilitas ramah disabilitas, ruang laktasi, serta ketersediaan akses internet (Wi-Fi) gratis bagi pemohon. • Transparansi Prosedur: Pemasangan maklumat pelayanan, kejelasan biaya (atau penegasan layanan gratis), serta estimasi waktu penyelesaian yang dipampang dengan jelas.istem Pengaduan yang Responsif: Adanya kanal pengaduan (WhatsApp, media sosial, atau kotak saran) yang ditindaklanjuti secara cepat sehingga masyarakat merasa	

						suaranya didengar.	
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	15	37.50	250%	Faktor Pendukung dipengaruhi oleh: • Kecamatan tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan sangat bergantung pada solidnya hubungan antara: a. Koordinasi Tiga Pilar: Hubungan harmonis dan rutin antara Camat, b. Kapolsek, dan Danramil. Pertemuan rutin (coffee morning) untuk memetakan kerawanan wilayah adalah kunci. • Faktor Partisipasi Masyarakat (Sistem Deteksi Dini) a. Revitalisasi Siskamling/Poskamling: Aktifnya ronda malam yang berbasis gotong royong. b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM): Adanya jaringan informan dari tokoh masyarakat/pemuda yang	-

						memberikan informasi cepat sebelum konflik membesar. c. Pemanfaatan Grup WhatsApp: Komunikasi cepat antara Ketua RT/RW dengan pihak Kecamatan/Kelurahan untuk melaporkan gangguan ketertiban secara *real-time*.	
Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029 (Baseline)	80	80	100%	Target Persentase Desa Tertib Administrasi di tahun 2025 mengonfirmasi bahwa organisasi telah **berhasil** menjembatani antara kewajiban administratif dalam RPD dengan visi inovatif dalam RPJMD - Penguatan Sistem Pengawasan Internal Desa (APIP) - Efektivitas Platform Digital Administrasi (Kelanjutan RPD) - Program Pendampingan Terpadu (Fondasi RPJMD)	-

1. **Analisis Capaian Berdasarkan RPD 2024-2026**

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Dari Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dapat disimpulkan bahwa :

Sasaran yang kesatu Capaian IKM di kecamatan Bagor pada tahun 2025 sebesar 98% dari target Renstra 2024-2026 sebesar 89 maka dikatakan tercapai. Adapaun penyebab keberhasilan dikarenakan dalam pelayanan telah dilakukan dengan baik yaitu dengan

- Digitalisasi Layanan: Penerapan aplikasi pelayanan mandiri atau sistem antrean *online* yang memangkas waktu tunggu masyarakat di loket.
- Sarana dan Prasarana yang Nyaman: Ruang tunggu yang representatif, adanya fasilitas ramah disabilitas, ruang laktasi, serta ketersediaan akses internet (Wi-Fi) gratis bagi pemohon.
- Transparansi Prosedur: Pemasangan maklumat pelayanan, kejelasan biaya (atau penegasan layanan gratis), serta estimasi waktu penyelesaian yang dipampang dengan jelas.
- Sistem Pengaduan yang Responsif: Adanya kanal pengaduan (WhatsApp, media sosial, atau kotak saran) yang ditindaklanjuti secara cepat sehingga masyarakat merasa suaranya didengar.

Motto Pelayanan Kecamatan Bagor “CERIA”

a. Cepat
b. Efesien dan Efektif
c. Ramah
d. Iklhas
e. Akuntabel

b. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Sasaran yang kedua meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan pada tahun 2025 terealisasi dari target Renstra 2024-2026 sebesar 62,50% dari target 40%. maka dapat dikatakan bahwa target tercapai. Adapun penyebab ketercapaian hal tersebut dikarenakan

- Solidnya hubungan antara Camat, Kapolsek, dan Danramil.
- Adanya dana desa atau dana kelurahan yang bisa dialokasikan untuk penguatan Linmas dan CCTV lingkungan.

2. Analisis Capaian Berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Baseline)

a. Indeks Sinergitas Kecamatan

Realisasi kinerja Tujuan strategis yang kedua Indeks Sinergitas Kecamatan dari tahun 2025 sebesar 106% Adapun penyebab ketercapaian hal tersebut dikarenakan tercapainya Faktor Penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja :

- Faktor Internal: Pergantian personel kunci yang mempengaruhi pola komunikasi atau sinergitas tim di tingkat Kecamatan.
- Faktor Eksternal: Adanya agenda besar (seperti Pemilu atau kegiatan nasional) di tahun 2025 yang mungkin menguras energi koordinasi sehingga skor sinergitas rutin menurun.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran yang kesatu Capaian IKM di kecamatan Bagor pada tahun 2025 sebesar 100,2% dari target Renstra 2025-2029 sebesar 86 maka dikatakan tercapai. Adapaun penyebab keberhasilan dikarenakan dalam pelayanan telah dilakukan dengan baik yaitu dengan

- Digitalisasi Layanan: Penerapan aplikasi pelayanan mandiri atau sistem antrean *online* yang memangkas waktu tunggu masyarakat di loket.
- Sarana dan Prasarana yang Nyaman: Ruang tunggu yang representatif, adanya fasilitas ramah disabilitas, ruang laktasi, serta ketersediaan akses internet (Wi-Fi) gratis bagi pemohon.
- Transparansi Prosedur: Pemasangan maklumat pelayanan, kejelasan biaya (atau penegasan layanan gratis), serta estimasi waktu penyelesaian yang dipampang dengan jelas.
- Sistem Pengaduan yang Responsif: Adanya kanal pengaduan (WhatsApp, media sosial, atau kotak saran) yang ditindaklanjuti secara cepat sehingga masyarakat merasa suaranya didengar.

Motto Pelayanan Kecamatan Bagor “CERIA”

a. Cepat
b. Efesien dan Efektif
c. Ramah
d. Iklhas
e. Akuntabel

c. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Sasaran yang kedua meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan pada tahun 2025 terealisasi dari target Renstra 2025-2029 sebesar 37,50% dari target 15% maka dapat dikatakan bahwa target tercapai. Adapun penyebab ketercapaian hal tersebut dikarenakan

- Solidnya hubungan antara Camat, Kapolsek, dan Danramil.
- Adanya dana desa atau dana kelurahan yang bisa dialokasikan untuk penguatan Linmas dan CCTV lingkungan.

d. Presentase Desa Tertib Administrasi Desa

Sasaran yang ketiga Analisis mengenai Meningkatnya Tertib Administrasi Desa merupakan tinjauan strategis terhadap bagaimana pemerintah desa mengelola dokumen, data, dan kebijakan secara sistematis. Berdasarkan data menunjukkan realisasi 100% dari target 80% pada tahun 2025, berikut adalah analisis mendalamnya. Keberhasilan mencapai 125% pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa desa telah memenuhi empat pilar utama administrasi sesuai regulasi (Permendagri No. 47 Tahun 2016):

- Administrasi Umum: Pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa pada Buku Peraturan Desa, Buku Keputusan Kepala Desa, dan Buku Inventaris Kekayaan Desa.
- Administrasi Penduduk: Penyelenggaraan buku induk penduduk, buku mutasi, dan buku rekapitulasi penduduk yang akurat dan *real-time*.
- Administrasi Keuangan: Penatausahaan keuangan yang mencakup buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank yang akuntabel.
- Administrasi Pembangunan: Pendokumentasian rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) dan hasil-hasil pembangunan secara transparan.

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang baik Kecamatan Bagor didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya. Kecamatan Bagor dalam melaksanakan seluruh Kecamatan Bagor pada Tahun 2025 melaksanakan 6 (Enam) program.

Tabel 3.1.6
Penggunaan Efisiensi Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dok Perenc.	(%) Capaian Kinerja	(%) Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	3	4	5
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	100,2%	48.33%	51.87
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	156%	48.33%	107.67
Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	106%	76.25%	29.75
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	102%	76.25%	25.75
Meningkatkan	Persentase	Renstra	250%	76.25%	173.75

Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	2025-2029 (Baseline)			
Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029 (Baseline)	100%	76.25%	23.75

Sumber : LRA (Jan-Sep) 2025 dan LRA (Jan-Des) 2025.

1. **Analisis Capaian Berdasarkan RPD 2024-2026**

a. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**

Efisiensi = Capaian Kinerja (%) - Persentase Penyerapan Anggaran (%)

Dari tabel diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

Dari Sasaran ke satu Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan capaian kinerja sebesar 100,2% dan realisasi anggaran dari empat Program yang mendukung yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rata rata dari empat Program tersebut sebesar 48.33 % sehingga dapat diperoleh efisiensi dengan formula capaian kinerja dikurangi dengan realisasi anggaran = 100,2 % – 48.33 % = **51.87 %.** Hal ini menandakan bahwa dengan serapan anggaran yang belum mencapai 100%, target kinerja mencapai 100%.

- **Penyebab:** Adanya optimalisasi teknologi informasi (digitalisasi) dan tingginya partisipasi swadaya perangkat desa, sehingga ketergantungan pada belanja modal/operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas output.

Hal ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi di Kecamatan Bagor dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun efesiensi ini disebabkan :

a. Dengan keterbatasan jumlah Pegawai karena pensiun Pemerintah Kecamatan Bagor tetap melaksanakan Pelayanan public secara maksimal. Sehingga Masyarakat mendapatkan pelayanan lebih baik lagi;
b. Rendahnya penyerapan Anggaran pada kegaiatan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, dikarenakan ada jabatan yang kosong yaitu Ka Sub Bag Perencana Keuangan dan Staf Pelaksana.

b. **Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.**

Untuk sasaran yang kedua, Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan capaian kinerjanya sebesar 156 % sedangkan realisasi anggaran yang mendukung :

a. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
b. Progran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Rata rata dari realisasi 2 progran tersebut sebesar 48.33% dengan demikian diperoleh tingkat efisiensi sebesar 156% - 48.33% = **107.67%**. Hal ini menandakan bahwa dengan serapan anggaran yang belum mencapai 100%, target kinerja mencapai 100%.

- Penyebab: Anggaran lebih banyak terserap pada belanja rutin (operasional/gaji/BBM patroli) yang sifatnya konsumtif, namun tidak menyentuh akar masalah (tindakan preventif). Ini menjadi catatan penting untuk RPJMD 2025-2029.

2. Analisis Capaian Berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Baseline)

a. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan

Dari tabel diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

Dari Sasaran ke satu Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 102% dan realisasi anggaran dari tiga Program yang mendukung yaitu

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Rata rata dari tiga Program tersebut sebesar 76.25 % sehingga dapat diperoleh efisiensi dengan formula capaian dikurangi dengan realisasi = 102 % – 76.25 % = **25.75 %.** Hal ini menandakan bahwa dengan serapan anggaran yang belum mencapai 100%, target kinerja hampir mencapai 100%.

- **Penyebab:** Adanya optimalisasi teknologi informasi (digitalisasi) dan tingginya partisipasi swadaya perangkat desa, sehingga ketergantungan pada belanja modal/operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas output.

Hal ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi di Kecamatan Bagor dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun efesiensi ini disebabkan :

Dengan keterbatasan jumlah Pegawai karena pensiun Pemerintah Kecamatan Bagor tetap melaksanakan Pelayanan public secara maksimal. Sehingga Masyarakat mendapatkan pelayanan lebih baik lagi;

Rendahnya penyerapan Anggaran pada kegaiatan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, dikarenakan ada jabatan yang kosong yaitu Ka Sub Bag Perencana Keuangan, Kasi, Sekkel dan Staf Pelaksana.

b. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Untuk sasaran yang kedua, Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan capaian kinerjanya sebesar 250 % sedangdan realisasi anggaran yang mendukung

a. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
b. Progran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Rata rata dari realisasi 2 progran tersebut sebesar 76.25% dengan demikian diperoleh tingkat efisiensi sebesar 250 % - 76.25% = **173.75%** menunjukkan adanya kurangnya komitmen dari Kecamatan Bagor, dalam melaksakan kinerja.

- Penyebab: Anggaran lebih banyak terserap pada belanja rutin (operasional/honor/koordinasi/konsultasi/BBM patroli) yang sifatnya konsumtif, namun tidak menyentuh akar masalah (tindakan preventif). Ini menjadi catatan penting untuk RPJMD 2025-2029.

c. Presentase Desa Tertib Administrasi Desa

Untuk sasaran yang ketiga, Meningkatnya Tertib Administrasi Desa capaian kinerjanya sebesar 100 % sedangkan dan realisasi anggaran yang mendukung

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 76.25%. Rata rata dari realisasi 1 program tersebut sebesar 76.25% dengan demikian diperoleh tingkat efisiensi sebesar 100 % - 76.25% = **23.75 %** menunjukkan adanya optimalisasi teknologi informasi (digitalisasi) dan tingginya partisipasi swadaya perangkat desa, sehingga ketergantungan pada belanja modal/operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas output.

A.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Kegiatan dan Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indicator sasaran yaitu pada Kecamatan Bagor sebagaimana table di bawah :

A.7 Analisis Program/Kerja yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.7 (1)

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan. (RPD 2024-2026)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perenc.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Renstra 2024-2026	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI SAKIP KECAMATAN.**	**80**	**71.40**	**89.25 %**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**100 %**
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100 %
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**100%**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/Bulan	18 Orang/Bulan	100%

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang	100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**5 Dokumen**	**83%**

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
			Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Penyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	5 Laporan	83%
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**76 Unit**	**76 Unit**	**100%**
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	67 Unit	67 Unit	100%

			Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	9 Unit	9 Unit	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25 Laporan**	**25 Laporan**	**100%**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**145 Unit**	**143 Unit**	**98.62%**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4Unit	3 Unit	75 %
			Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	74 Unit	74 Unit	100%

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	66 Unit	65 Unit	99%
			Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya YangDipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN TERTIB**	**95 %**	**77 %**	**81 %**
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**6 Laporan**	**2 Laporan**	**33%**
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	2 Laporan	33%
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**100%**

			Koordinasi / Sinergi Dengan perangkat daerah dan / Instansi Vertikal yang terkait dala pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**12 Laporan**	**11 Laporan**	**91 %**
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	11 Laporan	91 %
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR**	**95 %**	**100%**	**105%**
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**100%**

			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19 Lembaga Kemasyarakatan	19Lembaga Kemasyarakatan	100%
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG**	**95%**	**80%**	**84 %**
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**21 Desa/ Kelurahan**	**17 Desa/ Kelurahan**	**80 %**
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 Dokumen	17 Dokumen	80%

			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegitan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19 Dokumen	17 Dokumen	80%
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	**PROGRAM KOORDINASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PERMASALAHAN TRANTIBUM YANG DIKOORDINASIKAN PENANGANANNYA DENGAN FORKOPIMCAM SERTA TOGA/TOMAS**	**95 %**	**100%**	**105%**
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**15 Laporan**	**15 Laporan**	**100%**
			Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	15 Laporan	100%

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT YANG AKTIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN**	**95 %**	**100%**	**100%**
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**	**21 Lembaga Kemasyarakatan**	**21 Lembaga Kemasyarakatan**	**100%**
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	827 Orang	827 Orang	100%

Tabel 3.1.7 (2)

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan. (RPJMD 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perenc.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI SAKIP KECAMATAN.**	**80**	**71.40**	**89.25 %**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**100 %**
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100 %
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**100%**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/Bulan	18 Orang/Bulan	100%

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang	100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**5 Dokumen**	**83%**

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
			Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Penyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	5 Laporan	83%
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**76 Unit**	**76 Unit**	**100%**
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	67 Unit	67 Unit	100%

			Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	9 Unit	9 Unit	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25 Laporan**	**25 Laporan**	**100%**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**145 Unit**	**143 Unit**	**98.62%**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4Unit	3 Unit	75 %
			Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	74 Unit	74 Unit	100%

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	66 Unit	65 Unit	99%
			Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya YangDipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN TERTIB**	**95 %**	**77 %**	**81 %**
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**6 Laporan**	**2 Laporan**	**33%**
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	2 Laporan	33%
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**100%**

			Koordinasi / Sinergi Dengan perangkat daerah dan / Instansi Vertikal yang terkait dala pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**12 Laporan**	**11 Laporan**	**91 %**
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	11 Laporan	91 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR**	**95 %**	**100%**	**105%**
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**100%**

			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19 Lembaga Kemasyarakatan	19Lembaga Kemasyarakatan	100%
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	**PROGRAM KOORDINASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PERMASALAHAN TRANTIBUM YANG DIKOORDINASIKAN PENANGANANNYA DENGAN FORKOPIMCAM SERTA TOGA/TOMAS**	**95 %**	**100%**	**105%**
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**15 Laporan**	**15 Laporan**	**100%**
			Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	15 Laporan	100%

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT YANG AKTIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN**	**21 Lembaga / Organisasi Kemasy.**	**21 Lembaga / Organisasi Kemasy**	**100%**
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**	**21 Lembaga Kemasyarakatan**	**21 Lembaga Kemasyarakatan**	**100%**
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	827 Orang	827 Orang	100%

Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029 (Baseline)	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG**	**95%**	**80%**	**84 %**
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**21 Desa/ Kelurahan**	**17 Desa/ Kelurahan**	**80 %**
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 Dokumen	17 Dokumen	80%
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegitan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19 Dokumen	17 Dokumen	80%

Sumber : Renstra 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Bagor tahun anggaran 2025 diprioritaskan pada bidang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun rincian program dan pencapaiannya sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target Nilai 80 dan terealisasi sebesar Nilai 71,40. Sehingga kinerja tahun 2025 dapat mencapai 89.25%. Terdapat beberapa realisasi mulai dari dokumen, laporan dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Tahun 2025. Formulasi perhitungan dari capaian tersebut ialah dari nilai SAKIP Kecamatan yang diperoleh dari tim penilai SAKIP yakni sebesar 71,40 (BB). Berdasarkan catatan tim penilai SAKIP, salah satu upaya yang dapat diperbaiki antara lain; Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) harus memenuhi kriteria SMART, dimana salah satunya adalah "measurable" atau jelas dan dapat diukur. Target indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra adalah "Baik", tidak berupa angka sehingga sulit diukur.

Hal kompleks yang menjadi pendorong keberhasilan dari program ini ialah adanya sistem perencanaan yang efektif dan terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan. Sedangkan salah satu faktor penghambatnya jika anggaran tidak dialokasikan dengan tepat waktu, ini dapat menghambat kinerja organisasi perangkat daerah.

Dalam program ini terdapat kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat. Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun. Pada tahun ini berhasil mencapai 4 dokumen dari target 4 dokumen. Hal ini disebabkan karena tercukupinya dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat. Dokumen yang dimaksud antara lain; Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA); Rencana Kerja 2026 (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra 2025-2029).
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialahjumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah. Pada tahun ini berhasil mencapai 3 Dokumen dari taget 3 Dokumen (100%). Hal ini disebabkan karena tercukupinya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah antara lain; Dokumen Gaji dan Tunjangan; Laporan Keuangan dan Laporan Triwulan.
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan. Pada tahun ini mencapai 2 dokumen dari target 2 dokumen (100%). Hal ini disebabkan karena adanya dokumen Kepegawaian

yang meliputi Jumlah Pegawai Kecamatan yang naik pangkat, dan pensiun di kecamatan Bagor.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah. Pada tahun ini mencapai 5 dokumen dari target 6 dokumen (83%). Hal ini dikarenakan tersedianya Dokumen Tata Naskah Dinas (Surat Dinas, Nota Dinas, SPT, SK, SE), Dokumen Perencanaan dan Pelaporan, Dokumen Kepegawaian, Dokumen Aset dan Perlengkapan dan Dokumen Kearsipan. Upaya tersebut dapat diperbaiki dengan meninjau kembali dan perbaiki prosedur operasional standar agar lebih sederhana, efektif, dan efisien.
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Formulasi perhitungan dari kegiatan ini ialah jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan. Pada tahun ini mencapai 76 unit dari target 76 unit (100%). Terdiri
   Genset (1) Kursi Rapat (30) Kursi Staf (Ekstrakom) (15) Bangku Tunggu (2) Kursi Rapat (20) Sound System (2) Laptop (3) P.C Unit (3) pada perangkat daerah kecamatan Bagor.
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Formulasi perhitungan dari kegiatan ini ialah jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Pada tahun ini mencapai 25 laporan dari target 25 Laporan (100%). Laporan tersebut terdiri dari hasil pembayaran honor tenaga non ASN (12 Bulan/Laporan), pembayaran tagihan (12 Bulan/Laporan) dan Pembelian Materai 1 Laporan.
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Formulai perhitungan kegiatan ini adalah jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpelihara. Pada tahun ini mencapai 13 Unit dari target 13 Unit (100%). Terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (3) dan roda 4, pemeliharaan ac, Pemeliharaan Laptop, PC dan Pemeliharaan Gedung.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan target kinerja 95% terealisasi sebesar 77% dengan tingkat capaian sebesar 81%. Formulasi perhitungan dari program ini ialah persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana.

Upaya untuk terus mempertahankan capaian tersebut ialah mengimplementasikan dan terus perbarui sistem informasi terintegrasi untuk monitoring dan evaluasi kinerja secara *real-time*.

Pada program ini terdapat beberapa kegiatan antara lain :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan. Pada tahun ini kecamatan Bagor mencapai 2 laporan dari target sebesar 6 laporan. Sehingga besar capaiannya yakni 33%. Laporan tersebut berupa pelaksanaan intensifikasi PBB dan laporan pelaksanaan evaluasi pembayaran PBB. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa faktor pendorong salah satunyaadalah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kegiatanpemerintahan sehingga program yang dijalankan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Upaya yang dilakukan agar tetap dapat mempertahankan capaian kegiatan ini yakni dengan adanya regulasi, standar operasional prosedur (SOP), dan pedoman yang mengatur mekanisme koordinasi, sehingga setiap pihak mengetahui batasan dan tanggungjawabnya.

b. Koordinasi / Sinergi dengan perangkat daerah dan / Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum mencapai 4 laporan dari target sebesar 4 laporan. Sehingga besar capaiannya yakni 100%.
c. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat. Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. Pada tahun ini kecamatan Bagor mencapai 12 laporan dari target sebesar 11 laporan. Sehingga besar capaiannya yakni 100%. Laporan tersebut berupa laporan inovasi fasilitasi UMKM. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian pada kegiatan ini ialah memperkuat komunikasi antara camat dengan instansi ditingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan pihak terkait lainnya melalui forum koordinasi dan rapat rutin, serta menerapkan mekanisme komunikasi yang efektif untuk memastikan informasi tersampaikan dengan cepat dan tepat.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dengan target 95% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga diperoleh tingkat capaiannya sebesar 105% dengan formulasi perhitungan dari persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dalam proses pembangunan di kecamatan Bagor.

Tingkat keberhasilan diperoleh dari pertukaran informasi yang baik tentang program yang sedang berlangsung dan rencana kegiatan dan faktor penghambat ialah persaingan antar program yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat menghambat sinergi dan kerja sama. Upaya untuk meningkatkan capaian program ini ialah menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi perangkat desa/kelurahan serta masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, baik dalam bidang teknis maupun manajerial.

Dalam program ini hanya memuat satu kegiatan yakni koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tercapai 105%. Hal ini dikarenakan tercapainya jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan Bagor.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan target 95% dan terealisasi sebesar 100%. Formulasi perhitungan dari program ini adalah persentase permasalahan trantibum yang dikoordinasikan penanganannya dengan Forkopimcam serta Toga/Tomas. Pada program ini juga terdapat satu kegiatan yakni koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator jumlah laporan hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2025, capain kegiatan tersebut sebesar 15 laporan dari target 15 laporan, berupa laporan trantibum selama satu tahun. Keterlibatan aktif masyarakat dalam program dan kegiatan ini dapat meningkatkan efektivitasnya sehingga hal ini dapat mmenjadi faktor pendorong tercapainya program ini. Namun juga terdapat faktor penghambat yakni Kolaborasi yang kurang baik antara instansi-instansi terkait. Upaya yang dapat dilakukan agar kegiatan tersebut dapat terus mencapai target ialah meningkatkan koordinasi antara aparat keamanan (Polri, TNI, Satpol PP), pemerintah daerah, dan lembaga terkait melalui forum rutin, rapat koordinasi, dan penyusunan mekanisme kerja Bersama.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target sebesar 96% terealisasi sebesar 96%. Formulasi perhitungan program ini adalah persentase Lembaga/Organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Program ini digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umumsesuai penugasan kepala daerah, dengan indikator kegiatan yakni jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan. Capaian pada tahun ini ialah 21 Lembaga/Organisasi masyarakat dari target 21 lembaga/organisasi masyarakat. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk terus meningkatkan kegiatan ini adalah menyusun rencana kerja tahunan yang terintegrasi dengan visi dan misi daerah serta disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Faktor pendorong pada program ini ialah pengertian yang jelas mengenai tujuan dan tugas dari penugasan tersebut dan faktor penghambatnya ialah keterbatasan dalam pemahaman tugas dan tanggung jawab.

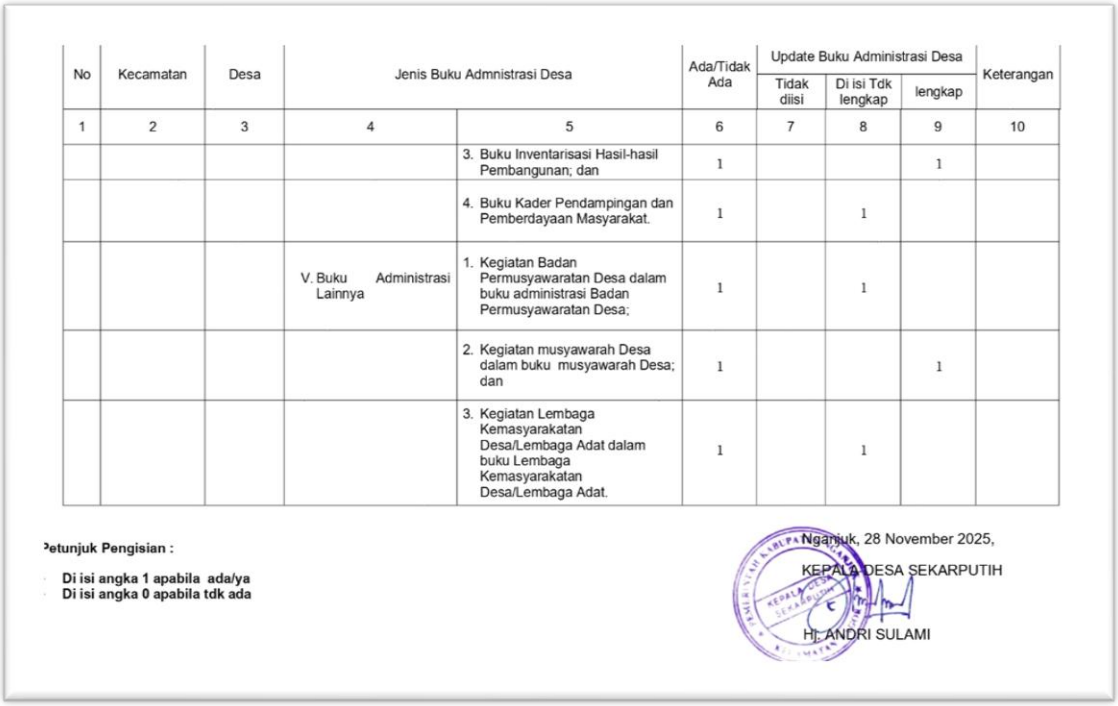
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ini dengan target 80 % dan realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2025, yang merupakan tahun awal implementasi Renstra 2025-2029, target kinerja ditetapkan sebesar 80%. Adapun realisasi yang berhasil dicapai sebesar 100% maka persentase capaian kinerja mencapai 125%, yang masuk dalam kategori "Sangat Berhasil". Indikator program ini ialah Persentase Desa Tertib Administrasi Desa yang dapat dilihat dari laporan administrasi Pemerintahan Desa sebagai berikut :

LAPORAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESADESA SEKARPUTIH KECAMATAN BAGOR

No	Kecamatan	Desa	Jenis Buku Admnistrasi Desa		Ada/Tidak Ada	Update Buku Administrasi Desa			Keterangan
						Tidak diisi	Di isi Tdk lengkap	lengkap	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bagor	Sekarputih	I. Buku Admnistrasi Umum	1. Buku Peraturan Di Desa;	1			1	
				2. Buku Keputusan Kepala Desa;	1			1	
				3. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;	1			1	
				4. Buku Aparat Pemerintah Desa;	1			1	
				5. Buku Tanah Kas Desa;	1			1	
				6. Buku Tanah di Desa;	1			1	
				7. Buku Agenda;	1			1	
				8. Buku Ekspedisi; dan	1			1	

No	Kecamatan	Desa	Jenis Buku Admnistrasi Desa		Ada/Tidak Ada	Update Buku Administrasi Desa			Keterangan
						Tidak diisi	Di isi Tdk lengkap	lengkap	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.	1			1	
			II. Buku Administrasi Penduduk	1. Buku Induk Penduduk;	1		1		
				2. Buku Mutasi Penduduk Desa;	1		1		
				3. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;	1		1		
				4. Buku Penduduk Sementara; dan	1		1		
				5. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu keluarga	1		1		
			III. Buku Administrasi Keuangan	1. Buku APB Desa;	1			1	
				2. Buku Rencana Anggaran Biaya;	1			1	
				3. Buku Kas Pembantu Kegiatan;	1			1	
				4. Buku Kas Umum;	1			1	
				5. Buku Kas Pembantu; dan	1			1	
				6. Buku Bank Desa.	1			1	
			IV. Buku Administrasi Pembangunan	1. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;	1			1	
				2. Buku Kegiatan Pembangunan;	1			1	



No	Kecamatan	Desa	Jenis Buku Admnistrasi Desa		Ada/Tidak Ada	Update Buku Administrasi Desa			Keterangan
						Tidak diisi	Di isi Tdk lengkap	lengkap	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan	1			1	
				4. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.	1		1		
			V. Buku Administrasi Lainnya	1. Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa;	1		1		
				2. Kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa; dan	1			1	
				3. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.	1		1		

Petunjuk Pengisian :

- Di isi angka 1 apabila ada/ya
- Di isi angka 0 apabila tdk ada

Ngariuk, 28 November 2025,

KEPALA DESA SEKARPUTIH

H. ANDRI SULAMI

Contoh : Desa Sekarputih

Program ini digunakan untuk kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mempunyai indikator jumlah desa tertib administrasi. Pada tahun ini capaian kegiatan ini sebesar 19 desa dengan target 19 desa. Upaya untuk mencapai hal tersebut ialah mlaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa dan perencanaan pembangunan.

B. Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja kegiatan akuntabilitas juga dapat dilihat dari realisasi anggaran pada tahun 2025, yang merupakan bagian dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Realisasi anggaran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk 2025 secara umum diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2025

Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**4.673.693.870**	**3.14.742.481**	**1.478.742.481**	**68.36%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangat Daerah	**5.947.000**	**5.947.000**	**0**	**100%**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.947.000	5.947.000	0	**100%**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.826.322.250**	**2.453.332.716**	**1.372.989.534**	**64.12%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.818.028.000	2.445.038.466	1.372.989.534	64.04%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.038.000	2.038.000	0	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	6.256.250	6.256.250	0	100%

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**15.648.400**	**15.206.000**	**442.400**	**97.17%**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3.500.000	3.260.000	340.000	93.14%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.148.400	11.946.000	202.400	98.33%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**128.160.040**	**112.725.950**	**15.434.090**	**87.96%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.501.600	5.475.000	26.600	99.52%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.503.740	71.385.450	9.118.290	88.67%
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	8.911.700	8.905.000	6.700	99.92%
Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	740.000	1.660.000	90.83%
Penyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.843.000	25.220.500	4.622.500	84.51%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000.000	1.000.000	0	100%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**373.140.930**	**328.260.533**	**44.880.397**	**87.97%**
Pengadaan Mebel	115.101.450	71.875.000	43.226.450	92.44%
Pengadaan Peralatan dan Mesin	238.059.480	236.585.533	1.473.947	99.38%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.980.000	19.800.000	180.000	99.10%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**205.396.000**	**166.034.782**	**39.361.218**	**80.84%**
Penyediaan Jasa SUrat Menyurat	3.000.000	3.000.000	0	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.028.000	25.540.599	25.487.401	50.05%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.368.000	137.494.183	13.873.817	90.83%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**119.079.250**	**113.235.500**	**5.843.750**	**95.09%**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	48.769.250	42.965.500	5.803.750	88.10%
Pemeliharaan Mebel	14.750.000	14.750.000	0	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.960.000	24.920.000	40.000	99.84%
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.600.000	30.600.000	0	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**81.650.000**	**49.250.00**	**32.400.000**	**60.32%**
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**25.300.000**	**15.700.000**	**9.600.000**	**62.06%**
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.300.000	15.700.000	9.600.000	62.06%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**20.250.000**	**6.000.000**	**14.250.000**	**29.63%**
Koordinasi / Sinergi Dengan perangkat daerah dan / Instansi Vertikal yang terkait dala pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum	20.250.000	6.000.000	14.250.000	29.63%

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**36.100.000**	**27.550.000**	**8.550.000**	**88.80%**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	36.100.000	27.550.000	8.550.000	76.32%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**65.425.000**	**58.100.000**	**7.325.000**	**88.80%**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**65.425.000**	**58.100.000**	**7.325.000**	88.80%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.075.000	11.400.000	675.000	94.41%
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	53.350.000	46.700.000	6.650.000	87.54%
PROGRAM KOORDINASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**47.450.000**	**39.300.000**	**8.150.000**	**82.82%**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**47.450.000**	**39.300.000**	**8.150.000**	**82.82%**
Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	47.450.000	39.300.000	8.150.000	82.82%

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**257.425.500**	**249.869.000**	**7.556.500**	**97.06%**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**257.425.500**	**249.869.000**	**7.556.500**	**97.06%**
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	257.425.500	249.869.000	7.556.500	97.06%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**61.715.000**	**50.050.000**	**11.685.000**	**88.10%**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	**61.715.000**	**50.050.000**	**11.685.000**	**88.10%**
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	35.665.500	27.950.000	7.715.500	78.37%
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	26.050.000	22.100.000	3.950.000	847.84%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (KEDONDONG)	**181.349.545**	**178.012.979**	**3.336.568**	**98.16%**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**12.190.000**	**10.540.000**	**1.650.000**	**86.46%**
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.190.000	10.540.000	1.650.000	86.46%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**38.540.450**	**38.540.450**	**0**	**100%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.093.000	1.093.000	0	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.366.150	31.366.150	0	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	3.080.800	3.080.800	0	100%
Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	0	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**27.428.545**	**27.068.223**	**360.322**	**98.69%**
Pengadaan Peralatan dan Mesin	27.428.545	27.068.223	360.322	98.69%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**80.178.000**	**79.157.659**	**1.020.341**	**98.73%**

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.630.000	3.560.587	69.413	98.09%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.548.000	75.597.072	950.928	98.76%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**10.000.000**	**9.967.347**	**32.653**	**98.67%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	8.212.550	7.939.300	273.250	96.67%
Pemeliharaan Mebel	1.800.000	1.800.000	0	100 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	0	100 %
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	9.967.347	32.653	99.67%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	**359.990.790**	**353.758.518**	**6.232.272**	**98.27%**
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	359.990.790	353.758.518	6.232.272	98.27%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	331.785.290	325.569.648	6.215.642	98.13%

Pembangunan Sarana dan Prasanana Kelurahan	28.205.500	28.188.870	16.630	99.94%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**147.572.753**	**147.572.753**	**0**	**100%**
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	147.572.753	147.572.753	0	100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (GUYANGAN)	**209.013.418**	**206.119.657**	**2.893.761**	98.68%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**12.190.000**	**12.190.000**	**0**	**100%**
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.190.000	12.190.000	0	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**38.453.050**	**38.298.250**	**154.800**	**99.60%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.093.000	1.093.000	0	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.278.750	31.125.000	153.750	99.51%
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	3.080.800	3.079.750	1.050	99.97%

Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	0	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**38.683.168**	**38.506.294**	**176.874**	**99.54%**
Pengadaan Peralatan dan Mesin	38.683.168	38.506.294	176.874	99.54%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**92.548.000**	**90.054.093**	**2.493.907**	**97.31%**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.000.000	14.457.021	1.542.979	90.36%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.548.000	75.597.072	950.928	98.76%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.139.200	27.071.020	68.180	99.75%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	8.539.200	8.520.000	19.200	99.78%
Pemeliharaan Mebel	1.500.000	1.500.000	0	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.100.000	2.100.000	0	100%

Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	14.951.020	48.980	99.67%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	**349.654.551**	**348.785.938**	**867.613**	**99.75%**
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	349.654.551	348.786.938	867.613	99.75%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	321.536.151	320.668.538	867.613	99.73%
Pembangunan Sarana dan Prasanana Kelurahan	28.118.400	28.118.400	0	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**130.546.762**	**130.546.762**	**0**	**100%**
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	130.546.762	130.546.762	0	100%

Sumber : SPJ Fungsional Desember 2025, DPPA 2025 dan LRA 2025

Adapun penyebab tidak dapat terserap atau terlaksananya kegiatan sehingga menyebabkan sisa anggaran tersebut sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Hasil program ini adalah terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian dan kelancaran kerja, yang terdiri dari 22 kegiatan dengan anggaran Rp4.673.693.870,00 terealisasi Rp3.194.742.481,00 atau 68,36%.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Hasil program ini adalah terwujudnya pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat desa dan kelurahan, program ini terdiri dari 3 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp81.650.000,00 terealisasi Rp49.250.000,00 atau 60,32%.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Hasil program ini adalah terwujudnya pembinaan kepada lembaga masyarakat dan kelompok sosial masyarakat serta gotong royong masyarakat, program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp65.425.000,00 terealisasi Rp58.100.000,00 atau 88,80%.

d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Hasil program ini adalah terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Bagor, program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp47.450.000,00 terealisasi Rp39.300.000,00 atau 82,82%.

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Hasil program ini adalah terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kecamatan Bagor sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah dengan alokasi anggaran Rp257.425.500,00 terealisasi Rp249.869.000,00 atau 97,06 %.

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Hasil program ini adalah terwujudnya peningkatan kinerja di Kecamatan Bagor dan pembinaan masyarakat, yang terdiri dari 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp61.715.500,00 terealisasi Rp50.050.000,00 atau 81,10%.

g. Peningkatan Kinerja Kelurahan Kedondong

Hasil program ini adalah terwujudnya pembinaan kepada lembaga masyarakat dan kelompok sosial masyarakat serta gotong royong masyarakat di Kelurahan Kedondong, yang terdiri dari 3 Program Kegiatan sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Hasil program ini adalah terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian dan kelancaran kerja, yang terdiri dari 12 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp181.349.545,00 terealisasi Rp178.373.301,00 atau 98,36%.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Hasil program ini adalah terwujudnya pembinaan kepada lembaga masyarakat dan kelompok sosial masyarakat serta gotong royong masyarakat, program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp359.990.790,00 terealisasi Rp353.758.518,00 atau 98,27%.

3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Hasil program ini adalah terwujudnya peningkatan kinerja dan pembinaan masyarakat, yang terdiri dari 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp147.572.753,00 terealisasi Rp147.572.553,00 atau 100,00%.

h. Peningkatan Kinerja Kelurahan Guyangan

Hasil program ini adalah terwujudnya pembinaan kepada lembaga masyarakat dan kelompok sosial masyarakat serta gotong royong masyarakat di Kelurahan Guyangan, yang terdiri dari 3 Program Kegiatan sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Hasil program ini adalah terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian dan kelancaran kerja, yang terdiri dari 12 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp217.552.618,00 terealisasi Rp214.639.657,00 atau 98,66%.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Hasil program ini adalah terwujudnya pembinaan kepada lembaga masyarakat dan kelompok sosial masyarakat serta gotong royong masyarakat, program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp349.654.551,00 terealisasi Rp348.786.938,00 atau 99,75%.

3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Hasil program ini adalah terwujudnya peningkatan kinerja dan pembinaan masyarakat, yang terdiri dari 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp130.546.762,00 terealisasi Rp130.546.762,00 atau 100%.

Tidak tercapainya target kinerja keuangan secara utuh (100%) disebabkan adanya beberapa hambatan dan kendala, antara lain :

a. Adanya beberapa capaian yang tidak tercapai seperti pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ada yang tidak terserap
b. Adanya efisiensi terhadap penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA;
c. Adanya kegiatan yang jangka waktu penyelenggaraannya dapat dipadatkan tanpa mengurangi efektifas kegiatan, sehingga kebutuhan anggaran kurang dari rencana yang telah ditetapkan;
d. Keterlambatan Penerbitan SPD berpengaruh pada proses realisasi anggaran.

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Bagor merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kecamatan Bagor dengan mengacu pada RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bagor pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Sebagaimana Sasaran mengacu pada Renstra 2024-2026 Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan capaian 98% Serta Sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan dengan capaian kinerja 156%. Sedangkan mengacu pada Renstra 2025-2029 Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan capaian kinerja 106% berdasarkan PK Perubahan yang mengacu pada renstra 2025-2029. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan capaian 102%, sasaran ke 2 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dengan capaian 250%, dan sasaran ke 3 Meningkatnya Tertib Administrasu Desa dengan capaian 100%.

Mengacu realisasi sampai akhir tahun atau renstra 2025-2029, semua sasaran strategis sudah mencapai target.

4.2. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. Melakukan re-orientasi terhadap program / kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen - dokumen perencanaan dan kinerja;
b. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program / kegiatan;
c. Memberdayakan sumber daya yang ada di kecamatan Bagor secara menyeluruh,efektif, dan efesien;
d. Menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.

e. Lebih memperhatikan lagi antara pak pada pengadaan belanja modal daerah (bmd) dan rencana kebutuhan belanja modal daerah (RKBMD) agar tidak terjadi lagi BMD yang tidak dapat di realisasi oleh kecamatan Bagor.

f. Mempertajam kembali dalam penargetan awal dalam renstra, agar tidak terjadi ketimpangan yang sangat jauh dengan realisasi.

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bagor Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempunaan laporan kami pada tahun mendatang.

Bagor, 06 Februari 2026
CAMAT BAGOR



SUWARNO, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690115 199803 1 006

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)
3. Dokumen Pelaksaaan Anggaran (DPA 2025) Ikhtisar DPA
4. Bukti Dukung kinerja lainnya yang mendukung tercapainya kinerja / outcome OPD baik pada level Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.
5. Bukti Dukung seluruh nya di doodle drive : https://drive.google.com/drive/folders/1gaL1hv-E7JNbQRPU4Na-mbrZAaZGRSHf?usp=sharing

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUWARNO, SE, MM
Jabatan : CAMAT BAGOR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si
Jabatan : Pj. BUPATI NGANJUK

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA Pj. BUPATI NGANJUK	PIHAK PERTAMA CAMAT BAGOR
SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si	**SUWARNO, SE, MM** Pembina TK I NIP. 19690115 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN BAGOR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Nilai 89
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	40 %

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.673.658.501	APBD 2025
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 135.475.000	APBD 2025
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 118.925.000	APBD 2025
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 65.225.000	APBD 2025
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 147.744.000	APBD 2025
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 87.070.000	APBD 2025

Nganjuk, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI NGANJUK

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si

PIHAK PERTAMA
CAMAT BAGOR

SUWARNO, SE, MM
Pembina TK I
NIP. 19690115 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUWARNO, SE, MM**

Jabatan : **CAMAT BAGOR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Drs. MARHAEN DJUMADI, A.Md.,S.E.,S.H.,M.M.,M.BA.**

Jabatan : **BUPATI NGANJUK**

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 29 September 2025

Pihak Kedua, BUPATI - NGANJUK	Pihak Pertama, CAMAT - BAGOR
Dr. Drs. MARHAEN DJUMADI, A.Md.,S.E.,S.H.,M.M.,M.BA.	**SUWARNO, SE, MM** Pembina Tk. I NIP. 19690115 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN BAGOR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	75 (Nilai)
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	86 (Nilai)
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	15 (%)
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	80 (%)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.064.056.833	PAPBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	81.650.000	PAPBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	775.070.341	PAPBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	47.450.000	PAPBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	257.425.500	PAPBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	339.835.015	PAPBD
		6.565.487.689	PAPBD

Nganjuk, 29 September 2025

Pihak Kedua,
BUPATI - NGANJUK

Dr. Drs. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA.

Pihak Pertama,
CAMAT - BAGOR

SUWARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19690115 199803 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BAGOR

Jalan Pramuka No. 05 Telp / Fax.(0358) 321702

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 10 /K/411.501/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN BAGOR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nganjuk nomor 17 tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 , perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Bagor Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan keputusan Camat Bagor.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
4. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta tata cara perubahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 2 Tahun 2012 tentang tata cara Penyusunan RPJPD , RPJMD , Rencana Strategis SKPD , RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018 ;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN BAGOR TAHUN 2024-2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Bagor, dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini .

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Bagor dalam menetapkan rencana kinerja , menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bagor Tahun 2024-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu , disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagor
Pada tanggal 05 Januari 2024
An. BUPATI NGANJUK
CAMAT BAGOR

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KEC. BAGOR

SUWARNO,SE , MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690115 199803 1 006

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 188/ / K/411.501/2024
Tanggal : 05 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BAGOR
TAHUN 2024-2026

A. Nama Organisasi : Kabupaten Nganjuk

B. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Bagor

C. Tugas Pokok : Tugas pokok Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk yaitu : menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

D. Fungsi :

a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
b. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum ;
c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
d. Pengoordinasiaan pemelihara prasarana dan fasilitas pelayananumum;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dan pembangunan;
g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/ atau kelurahan;
h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas nyadan/ ataukelurahan;
i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026
KECAMATAN BAGOR

NO	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN:				
1.	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima.	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bagor tahun 2024 adalah penilaian umum yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk meliputi penilaian Administrasi, penilaian Presentasi, dan penilaian Tinjau Lapang dalam rangka untuk mengkonfirmasi kinerja perangkat Kecamata dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek: 1. Aspek Kesejahteraan 2. Aspek pemberdayaan 3. Aspek perekonomian 4. Aspek perencanaan 5. Aspek hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Pemerintahan Dimana penilaian administasi dilakukan dengan mengisi kertas kerja penilaian kecamatan dan melengkapai data dukungnya melalui aplikasi Sistem Informasi Kerja Kecamatan (SINCAN) dengan url : https://satria.ropem.jatimprov.go.id/sincan Sedangkan penilauan tinjau lapang dilakukan	Laporan Pelaksanaan Tugas Fasilitasi.	Kecamatan Bagor.

			dalam rangka mengkonfirmasi dan validasi administrasi ter\hadap kertas kerja dan data dukung yang telah dihuimpun.		
	SASARAN :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat diukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan Publik dengan url : https://sukma.jatimprov.go.id/ Ruang Lingkup Survey Kepuasan Masyarakat **meliputi :** 1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Waktu pelaksanaan 4. Biaya/ Tarif 5. Produk Spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetemsi dari Pelaksana 7. Perilaku dari Pelaksana 8. Maklumat Pelayanan 9. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan. Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dikelompokan / dikategorikan sebagai berikut : 1. Skor 0 – 40 Kategori Kurang Baik 2. Skor 41 – 60 Kategori Cukup Baik 3. Skor 61 – 80 Kategori Baik 4. Skor 81 – 100 Kategori Sangat Baik	Survey dari masyarakat melalui Aplikasi E-Sukma	Kecamatan Bagor

2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang di koordinasikan dengan FORPIMCAM dalam satu tahun ——————————— X 100 % Jumlah semua penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 tahun	Laporan Jumlah Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan.	Kecamatan Bagor

An. BUPATI NGANJUK
CAMAT BAGOR

SUWARNO,SE , MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690115 199803 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
Jalan Pramuka No. 05 Telp / Fax.(0358) 321702
Kode Pos: 64461

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 100.3.3.2/ 21 /K/411.501/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN BAGOR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nganjuk nomor 17 tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 , perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Bagor Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan keputusan Camat Bagor.

Mengingat :
1. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
4. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta tata cara perubahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 2 Tahun 2012 tentang tata cara Penyusunan RPJPD , RPJMD , Rencana Strategis SKPD , RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018 ;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018 ;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN BAGOR TAHUN 2025-2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Bagor, dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini .

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Bagor dalam menetapkan rencana kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bagor Tahun 2025-2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagor
Pada tanggal 30 September 2025
An. BUPATI NGANJUK
CAMAT BAGOR

SUWARNO,SE , MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690115 199803 1 006

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 100.3.3.2/ 21 /K/411.501/2025
Tanggal : 30 September 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BAGOR
TAHUN 2025-2029

A. Nama Organisasi : Kabupaten Nganjuk

B. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Bagor

C. Tugas Pokok : Tugas pokok Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk yaitu : menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

D. Fungsi :

a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
b. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum ;
c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
d. Pengoordinasiaan pemelihara prasarana dan fasilitas pelayananumum;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dan pembangunan;
g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/ atau kelurahan;
h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas nyadan/ ataukelurahan;
i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
KECAMATAN BAGOR

NO	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	TUJUAN:				
1.	Meningkatnya sinegritas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bagor tahun 2024 adalah penilaian umum yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk meliputi penilaian Administrasi, penilaian Presentasi, dan penilaian Tinjau Lapang dalam rangka untuk mengkonfirmasi kinerja perangkat Kecamata dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek: 1. Aspek Kesejahteraan 2. Aspek pemberdayaan 3. Aspek perekonomian 4. Aspek perencanaan 5. Aspek hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Pemerintahan Dimana penilaian administasi dilakukan dengan mengisi kertas kerja penilaian kecamatan dan melengkapai data dukungnya melalui aplikasi Sistem Informasi Kerja Kecamatan (SINCAN) dengan url :	Hasil Dari Penilaian Aplikasi SINCAN yang di sertakan Dokumen Pendukung sesuai indikator penilaian	Camat Bagor.

			https://satria.ropem.jatimprov.go.id/sincan Sedangkan penilauan tinjau lapang dilakukan dalam rangka mengkonfirmasi dan validasi administrasi ter\hadap kertas kerja dan data dukung yang telah dihuimpun.		
	SASARAN :				
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat diukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan Publik dengan url : https://sukma.jatimprov.go.id/ Ruang Lingkup Survey Kepuasan Masyarakat meliputi : 1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Waktu pelaksanaan 4. Biaya/ Tarif 5. Produk Spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetemsi dari Pelaksana 7. Perilaku dari Pelaksana 8. Maklumat Pelayanan 9. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan. Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dikelompokan / dikategorikan sebagai berikut : 1. Skor 0 – 40 Kategori Kurang Baik 2. Skor 41 – 60 Kategori Cukup Baik 3. Skor 61 – 80 Kategori Baik 4. Skor 81 – 100 Kategori Sangat Baik	Hasil evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat melalui SuKMa-e Jatim	Camat Bagor

2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Presentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Konsep Indikator: Diperoleh dari jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun Ini dikalikan 100 % Formulasi Perhitungan: $\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N-1 dikurangi Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N-1}} \times 100\ \%$	Laporan Jumlah Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan.	Camat Bagor
3.	Sasaran : Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Konsep Indikator: Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa dibagi Jumlah Total Desa dikalikan 100% Formulasi Perhitungan: $\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa}}{\text{Jumlah total Desa}} \times 100\ \%$	Hasil dari Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas)	Camat Bagor

An. BUPATI NGANJUK
CAMAT BAGOR

SUWARNO,SE , MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690115 199803 1 006

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA-BELANJA SKPD
KAB. NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.06.0000/001/2025

SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bagor

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bagor									Rp4.413.819.508,00	Rp393.786.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.807.606.438,00	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp4.413.819.508,00	Rp393.786.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.807.606.438,00	
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp4.413.819.508,00	Rp393.786.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.807.606.438,00	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp3.859.380.508,00	Rp393.786.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.253.167.438,00	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp8.668.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.668.000,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.668.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.668.000,00	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp3.226.888.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.226.888.260,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.215.103.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.215.103.260,00	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.918.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.918.000,00	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua		Rp8.867.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.867.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
					SKPD		Kelurahan/Desa							
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp90.339.138,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.339.138,00	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.690.738,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.690.738,00	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp67.648.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.648.400,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp153.462.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.462.110,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.501.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.501.600,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp89.082.860,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.082.860,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.882.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.882.650,00	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp43.595.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.595.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp393.786.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp393.786.930,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp115.101.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.101.450,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp211.974.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp211.974.480,00	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp66.711.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.711.000,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp205.396.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp205.396.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp51.028.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.028.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp151.368.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.368.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp174.627.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.627.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp63.746.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.746.500,00	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.750.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp24.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.960.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp71.170.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.170.500,00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				Rp135.475.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.475.000,00	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				Rp52.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.375.000,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp52.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.375.000,00	
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				Rp19.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.800.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp19.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.800.000,00	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				Rp63.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.300.000,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp63.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.300.000,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp118.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.925.000,00	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				Rp118.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.925.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp19.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.675.000,00	
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp99.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.250.000,00	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				Rp65.225.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.225.000,00	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				Rp65.225.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.225.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp65.225.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.225.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp147.744.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.744.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesual Penugasan Kepala Daerah				Rp147.744.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.744.000,00	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp147.744.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.744.000,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp87.070.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.070.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp87.070.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.070.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp49.770.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.770.000,00	
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa		Rp37.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.300.000,00	
7.01.0.00.0.00.06.0001 - Kelurahan Kedondong									Rp372.354.503,00	Rp340.713.835,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp713.068.338,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp372.354.503,00	Rp340.713.835,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp713.068.338,00	
7	01				KECAMATAN				Rp372.354.503,00	Rp340.713.835,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp713.068.338,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp168.946.250,00	Rp27.428.545,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp196.374.795,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp23.265.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.265.000,00	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong		Rp23.265.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.265.000,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp42.490.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.490.700,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong		Rp1.093.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.093.500,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong		Rp32.889.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.889.700,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong		Rp5.507.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.507.500,00	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong		Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp27.428.545,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.428.545,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong		Rp0,00	Rp27.428.545,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.428.545,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp80.178.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.178.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong		Rp3.630.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.630.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong		Rp76.548.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.548.000,00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp23.012.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.012.550,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong		Rp8.212.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.212.550,00	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel		Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong		Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong		Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp46.705.500,00	Rp313.285.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp359.990.790,00	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				Rp46.705.500,00	Rp313.285.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp359.990.790,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong		Rp18.500.000,00	Rp313.285.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp331.785.290,00	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong		Rp28.205.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.205.500,00	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				Rp156.702.753,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp156.702.753,00	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				Rp156.702.753,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp156.702.753,00	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong		Rp156.702.753,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp156.702.753,00	
7.01.0.00.0.00.06.0002 - Kelurahan Guyangan									Rp362.228.262,00	Rp351.219.319,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp713.447.581,00	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp362.228.262,00	Rp351.219.319,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp713.447.581,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp362.228.262,00	Rp351.219.319,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp713.447.581,00	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp185.433.100,00	Rp38.683.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp224.116.268,00	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp23.265.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.265.000,00	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan		Rp23.265.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.265.000,00	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp42.480.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.480.900,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan		Rp1.093.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.093.500,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan		Rp32.879.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.879.900,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan		Rp5.507.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.507.500,00	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan		Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp38.683.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.683.168,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan		Rp0,00	Rp38.683.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.683.168,00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp92.548.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.548.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan		Rp16.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.000.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan		Rp76.548.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.548.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp27.139.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.139.200,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan		Rp8.539.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.539.200,00	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel		Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan		Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan		Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.100.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp37.118.400,00	Rp312.536.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp349.654.551,00	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				Rp37.118.400,00	Rp312.536.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp349.654.551,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan		Rp9.000.000,00	Rp312.536.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp321.536.151,00	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan		Rp28.118.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.118.400,00	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				Rp139.676.762,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.676.762,00	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				Rp139.676.762,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.676.762,00	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan		Rp139.676.762,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.676.762,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp353.164.246,00
Februari	Rp550.693.337,00
Maret	Rp664.005.737,00
April	Rp923.069.745,00
Mei	Rp547.870.065,00
Juni	Rp749.545.265,00
Juli	Rp995.813.089,00
Agustus	Rp465.278.985,00
September	Rp404.311.345,00
Oktober	Rp322.764.343,00
November	Rp68.869.475,00
Desember	Rp188.736.725,00
Jumlah	**Rp6.234.122.357,00**

Nganjuk, Tanggal 02 Januari 2025
CAMAT BAGOR

SUWARNO,SE MM
NIP. 19[illegible]031006

Mengesahkan,
PPKD

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
N P. 196805111992022001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Drs. ADAM MUHARTO, A.P., M.Si	197305111993111002	Wakil Ketua	
3.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si	196805111992022001	Sekretaris	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. NGANJUK

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/2.07.01.2.00.0.00.26.0000/031/2025
SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bagor

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun									Bertambah / (Berkurang)		
								T-1	Sebelum					Setelah					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Bagor								Rp4.413.818.506,00	Rp393.786.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.807.605.436,00	Rp4.164.563.200,00	Rp419.871.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.584.435.130,00	(Rp223.171.306,00)	-4,64	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			Rp4.413.818.506,00	Rp393.786.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.807.605.436,00	Rp4.164.563.200,00	Rp419.871.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.584.435.130,00	(Rp223.171.306,00)	-4,64	
7	01				KECAMATAN			Rp4.413.818.506,00	Rp393.786.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.807.605.436,00	Rp4.164.563.200,00	Rp419.871.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.584.435.130,00	(Rp223.171.306,00)	-4,64	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp3.859.386.506,00	Rp393.786.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.253.167.436,00	Rp3.742.678.700,00	Rp419.871.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.162.550.630,00	(Rp90.616.806,00)	-2,13	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp8.688.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.688.000,00	Rp5.947.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.947.000,00	(Rp2.741.000,00)	-31,56	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp8.688.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.688.000,00	Rp5.947.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.947.000,00	(Rp2.741.000,00)	-31,56	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp3.226.888.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.226.888.260,00	Rp3.223.397.510,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.223.397.510,00	(Rp3.490.750,00)	-0,11	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.215.103.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.215.103.260,00	Rp3.215.103.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.215.103.260,00	Rp0,00	0,00	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.916.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.916.000,00	Rp2.038.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.038.000,00	(Rp878.000,00)	-30,11	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp8.867.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.867.000,00	Rp6.256.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.256.250,00	(Rp2.610.750,00)	-29,44	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp90.338.138,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.338.138,00	Rp13.888.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.888.400,00	(Rp76.449.738,00)	-84,62	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp22.690.738,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.690.738,00	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.750.000,00	(Rp20.940.738,00)	-92,29	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp67.648.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.648.400,00	Rp12.148.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.148.400,00	(Rp55.500.000,00)	-82,04	
7	01	01	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp153.462.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.462.110,00	Rp115.940.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.940.040,00	(Rp37.522.070,00)	-24,45	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.501.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.501.600,00	Rp5.501.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.501.600,00	Rp0,00	0,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp89.067.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.067.850,00	Rp76.853.749,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.853.749,00	(Rp12.214.101,00)	-13,71	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp11.882.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.882.650,00	Rp8.911.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.911.700,00	(Rp2.970.950,00)	-25,00	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	0,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp43.595.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.595.000,00	Rp21.273.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.273.000,00	(Rp22.322.000,00)	-51,21	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	0,00	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp0,00	Rp393.786.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp393.786.930,00	Rp0,00	Rp419.871.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp419.871.930,00	Rp26.085.000,00	6,21	
7	01	01	2.07	0003	Pengadaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp115.101.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.101.450,00	Rp0,00	Rp115.101.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.101.450,00	Rp0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp211.974.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp211.974.480,00	Rp0,00	Rp238.059.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp238.059.480,00	Rp26.085.000,00	10,96	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp66.711.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.711.000,00	Rp0,00	Rp66.711.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.711.000,00	Rp0,00	0,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp205.396.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp205.396.000,00	Rp205.396.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp205.396.000,00	Rp0,00	0,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	0,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp51.028.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.028.000,00	Rp51.028.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.028.000,00	Rp0,00	0,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp151.368.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.368.000,00	Rp151.368.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.368.000,00	Rp0,00	0,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp174.627.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.627.000,00	Rp178.099.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp178.099.750,00	Rp3.472.750,00	1,99	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp53.744.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.744.500,00	Rp67.219.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.219.250,00	Rp3.472.750,00	5,17	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp14.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.750.000,00	Rp14.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.750.000,00	Rp0,00	0,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp24.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.950.000,00	Rp24.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.950.000,00	Rp0,00	0,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
								T-1	Sebelum					Setelah				T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
7	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp71.170.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.170.500,00	Rp71.170.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.170.500,00	Rp0,00	0,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Rp135.475.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.475.000,00	Rp82.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.125.000,00	(Rp53.350.000,00)	(47,06)	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Rp52.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.375.000,00	Rp33.775.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.775.000,00	(Rp18.600.000,00)	(55,07)	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp52.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.375.000,00	Rp33.775.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.775.000,00	(Rp18.600.000,00)	(55,07)	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			Rp19.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.800.000,00	Rp14.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.250.000,00	(Rp5.550.000,00)	(38,89)	
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp19.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.800.000,00	Rp14.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.250.000,00	(Rp5.550.000,00)	(38,89)	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Rp63.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.300.000,00	Rp44.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.100.000,00	(Rp19.200.000,00)	(43,54)	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp63.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.300.000,00	Rp44.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.100.000,00	(Rp19.200.000,00)	(43,54)	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Rp118.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.925.000,00	Rp75.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.150.000,00	(Rp43.775.000,00)	(58,25)	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Rp118.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.925.000,00	Rp75.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.150.000,00	(Rp43.775.000,00)	(58,25)	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp19.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.675.000,00	Rp12.075.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.075.000,00	(Rp7.600.000,00)	(62,64)	
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp99.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.250.000,00	Rp63.075.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.075.000,00	(Rp36.175.000,00)	(57,35)	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Rp65.225.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.225.000,00	Rp45.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.425.000,00	(Rp19.800.000,00)	(43,55)	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Rp65.225.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.225.000,00	Rp45.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.425.000,00	(Rp19.800.000,00)	(43,55)	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp65.225.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.225.000,00	Rp45.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.425.000,00	(Rp19.800.000,00)	(43,55)	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Rp147.744.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.744.000,00	Rp144.994.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.994.000,00	(Rp2.750.000,00)	(1,90)	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Rp147.744.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.744.000,00	Rp144.994.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.994.000,00	(Rp2.750.000,00)	(1,90)	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp147.744.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.744.000,00	Rp144.994.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.994.000,00	(Rp2.750.000,00)	(1,90)	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Rp87.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.870.000,00	Rp64.190.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.190.500,00	(Rp23.679.500,00)	(26,94)	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Rp87.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.870.000,00	Rp64.190.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.190.500,00	(Rp23.679.500,00)	(26,94)	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp49.770.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.770.000,00	Rp38.140.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.140.500,00	(Rp11.629.500,00)	(30,46)	
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Semua Kelurahan/Desa	Rp37.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.300.000,00	Rp26.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.050.000,00	(Rp11.250.000,00)	(43,15)	
7.01.1.00.0.00.06.0001 - Kelurahan Kedondong								Rp372.354.503,00	Rp340.713.835,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp713.068.338,00	Rp348.199.253,00	Rp340.713.835,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp688.913.088,00	(Rp24.155.250,00)	(3,51)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			Rp372.354.503,00	Rp340.713.835,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp713.068.338,00	Rp348.199.253,00	Rp340.713.835,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp688.913.088,00	(Rp24.155.250,00)	(3,51)	
7	01				KECAMATAN			Rp372.354.503,00	Rp340.713.835,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp713.068.338,00	Rp348.199.253,00	Rp340.713.835,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp688.913.088,00	(Rp24.155.250,00)	(3,51)	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp168.946.250,00	Rp27.428.545,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp196.374.795,00	Rp153.921.050,00	Rp27.428.545,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp181.349.595,00	(Rp15.025.200,00)	(7,65)	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp23.265.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.265.000,00	Rp12.190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.190.000,00	(Rp11.075.000,00)	(47,60)	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	Rp23.265.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.265.000,00	Rp12.190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.190.000,00	(Rp11.075.000,00)	(47,60)	
7	01	01	2.03		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp42.490.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.490.700,00	Rp38.540.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.540.450,00	(Rp3.950.250,00)	(9,30)	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	Rp1.093.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.093.500,00	Rp1.093.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.093.500,00	Rp0,00	0,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	Rp32.889.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.889.700,00	Rp31.366.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.366.150,00	(Rp1.523.550,00)	(4,64)	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	Rp5.507.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.507.500,00	Rp3.080.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.080.800,00	(Rp2.426.700,00)	(44,05)	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	0,00	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp0,00	Rp27.428.545,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.428.545,00	Rp0,00	Rp27.428.545,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.428.545,00	Rp0,00	0,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	Rp0,00	Rp27.428.545,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.428.545,00	Rp0,00	Rp27.428.545,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.428.545,00	Rp0,00	0,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp80.178.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.178.000,00	Rp80.178.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.178.000,00	Rp0,00	0,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	Rp3.630.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.630.000,00	Rp3.630.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.630.000,00	Rp0,00	0,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	Rp76.548.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.548.000,00	Rp76.548.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.548.000,00	Rp0,00	0,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp23.012.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.012.550,00	Rp23.012.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.012.550,00	Rp0,00	0,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	Rp8.212.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.212.550,00	Rp8.212.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.212.550,00	Rp0,00	0,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
								T-1											
								Sebelum					Setelah						
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00	0,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	0,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Rp46.705.500,00	Rp313.285.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp359.990.790,00	Rp46.705.500,00	Rp313.285.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp359.990.790,00	Rp0,00	0,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Rp46.705.500,00	Rp313.285.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp359.990.790,00	Rp46.705.500,00	Rp313.285.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp359.990.790,00	Rp0,00	0,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	Rp18.500.000,00	Rp313.285.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp331.785.290,00	Rp18.500.000,00	Rp313.285.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp331.785.290,00	Rp0,00	0,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	Rp28.205.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.205.500,00	Rp28.205.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.205.500,00	Rp0,00	0,00
7	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Rp156.702.753,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp156.702.753,00	Rp147.572.753,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.572.753,00	(Rp9.130.000,00)	(5,83)
7	01	05	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Rp156.702.753,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp156.702.753,00	Rp147.572.753,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.572.753,00	(Rp9.130.000,00)	(5,83)
7	01	05	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Kedondong	Rp156.702.753,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp156.702.753,00	Rp147.572.753,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.572.753,00	(Rp9.130.000,00)	(5,83)
7.01.0.00.0.00.08.0002 - Kelurahan Guyangan								Rp362.228.262,00	Rp351.219.319,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp713.447.581,00	Rp337.995.412,00	Rp351.219.319,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp689.214.731,00	(Rp24.232.850,00)	(3,40)
7					UNSUR KEWILAYAHAN			Rp362.228.262,00	Rp351.219.319,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp713.447.581,00	Rp337.995.412,00	Rp351.219.319,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp689.214.731,00	(Rp24.232.850,00)	(3,40)
7	01				KECAMATAN			Rp362.228.262,00	Rp351.219.319,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp713.447.581,00	Rp337.995.412,00	Rp351.219.319,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp689.214.731,00	(Rp24.232.850,00)	(3,40)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp185.433.100,00	Rp38.683.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp224.116.268,00	Rp170.332.250,00	Rp38.683.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp209.013.418,00	(Rp15.102.850,00)	(6,74)
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp23.265.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.265.000,00	Rp12.190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.190.000,00	(Rp11.075.000,00)	(47,61)
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyiapan/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	Rp23.265.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.265.000,00	Rp12.190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.190.000,00	(Rp11.075.000,00)	(47,61)
7	01	01	2.03		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp42.480.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.480.500,00	Rp38.453.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.453.050,00	(Rp4.027.450,00)	(9,48)
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	Rp1.093.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.093.500,00	Rp1.093.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.093.500,00	Rp0,00	0,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	Rp32.879.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.879.900,00	Rp31.278.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.278.750,00	(Rp1.601.150,00)	(4,87)
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	Rp5.507.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.507.500,00	Rp3.089.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.089.800,00	(Rp2.417.700,00)	(43,89)
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	0,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp0,00	Rp38.683.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.683.168,00	Rp0,00	Rp38.683.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.683.168,00	Rp0,00	0,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	Rp0,00	Rp38.683.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.683.168,00	Rp0,00	Rp38.683.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.683.168,00	Rp0,00	0,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp82.548.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.548.000,00	Rp82.548.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.548.000,00	Rp0,00	0,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	Rp16.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.000.000,00	Rp16.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.000.000,00	Rp0,00	0,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	Rp76.548.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.548.000,00	Rp76.548.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.548.000,00	Rp0,00	0,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp27.139.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.139.200,00	Rp27.139.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.139.200,00	Rp0,00	0,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	Rp8.539.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.539.200,00	Rp8.539.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.539.200,00	Rp0,00	0,00
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	0,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.100.000,00	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.100.000,00	Rp0,00	0,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Rp37.118.400,00	Rp312.536.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp349.654.551,00	Rp37.118.400,00	Rp312.536.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp249.654.551,00	Rp0,00	0,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Rp37.118.400,00	Rp312.536.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp349.654.551,00	Rp37.118.400,00	Rp312.536.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp249.654.551,00	Rp0,00	0,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Keluruhan	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	Rp9.000.000,00	Rp312.536.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp321.536.151,00	Rp5.000.000,00	Rp312.536.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp321.536.151,00	Rp0,00	0,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Keluruhan	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	Rp28.118.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.118.400,00	Rp28.118.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.118.400,00	Rp0,00	0,00
7	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Rp139.676.762,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.676.762,00	Rp130.546.762,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.546.762,00	(Rp9.130.000,00)	(6,54)
7	01	05	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Rp139.676.762,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.676.762,00	Rp130.546.762,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.546.762,00	(Rp9.130.000,00)	(6,54)
7	01	05	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Bagor, Guyangan	Rp139.676.762,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.676.762,00	Rp130.546.762,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.546.762,00	(Rp9.130.000,00)	(6,54)

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp343.847.421,00
Februari	Rp437.445.897,00
Maret	Rp588.772.397,00
April	Rp646.077.258,00
Mei	Rp555.902.040,00
Juni	Rp597.144.580,00
Juli	Rp1.287.655.008,00
Agustus	Rp4[illegible]
September	Rp392.501.920,00
Oktober	Rp327.356.268,00
November	Rp67.323.150,00
Desember	Rp90.000.840,00
Jumlah	**Rp5.562.562.949,00**

Nganjuk, Tanggal 10 Maret 2025
CAMAT BAGOR

EDWARNO SE MM
NIP 196901151999031006

Mengesahkan,
PPKD

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP 196805111992032001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. NUR SOLEKAN, M.SI	196612271988021001	Sekretaris	
2	Drs. ADAM MUHARTO, A.P., M.SI	197305111993111002	Wakil Ketua	
3	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.SI	196805111992032001	Ketua	

*) Sesuai periodisasi SPD

Lampiran Bukti Dukung:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perenc.	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Tujuan :** **Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**Indeks Sinergitas Kecamatan**	**Renstra 2024-2026**	**75**	**79.70**	**106%**	https://drive.google.com/drive/folders/1VMLCw8elPInbvjGqnWDcfD-F5asPzx1y?usp=sharing
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**NILAI SAKIP KECAMATAN**	**Renstra 2024-2026**	**80**	**71.40**	**89.25 %**	https://drive.google.com/file/d/1uerFZ3-cEebN-AcF5mY6ZfxWVB3I-ggN/view?usp=sharing
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.**	**Renstra 2024-2026**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**100 %**	https://drive.google.com/drive/folders/1irQT7CP7awMBMd-6c0WgpiZPwRZQguJT?usp=sharing
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Renstra 2024-2026	4 Laporan	4 Laporan	100 %	https://drive.google.com/drive/folders/1irQT7CP7awMBMd-6c0WgpiZPwRZQguJT?usp=sharing
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Renstra 2024-2026**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**100%**	https://drive.google.com/drive/folders/1ZrWO3NyT9VOcXzPiiTcrHmoh0jAwvykh?usp=sharing
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Renstra 2024-2026	18 Orang/Bulan	18 Orang/Bulan	100%	https://drive.google.com/file/d/1KCfGQ3KfnCOfja2QBhekRdS64j3_sj1J/view?usp=sharing

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Renstra 2024-2026	1 Laporan	1 Laporan	100%	https://drive.google.com/file/d/1VZxD4wWzunt8WMP3JcI3wAlNeYimw8U9/view?usp=sharing
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Renstra 2024-2026	18 Laporan	18 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1ZrWO3NyT9VOcXzPiiTcrHmoh0jAwvykh?usp=sharing
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Renstra 2024-2026**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	https://drive.google.com/drive/folders/1DfSCpdKrKLZbViFE1c-XN1AmqA2k9NOj?usp=sharing
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Renstra 2024-2026	0	0	0	https://drive.google.com/drive/folders/1DfSCpdKrKLZbViFE1c-XN1AmqA2k9NOj?usp=sharing
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Renstra 2024-2026	18 Orang	18 Orang	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1DfSCpdKrKLZbViFE1c-XN1AmqA2k9NOj?usp=sharing
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Renstra 2024-2026**	**6 Dokumen**	**5 Dokumen**	**84%**	https://drive.google.com/drive/folders/18JQ2kQeKK-dKrqGYXQ_bD21fLXVITmgS?usp=sharing

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Renstra 2024-2026	1 Paket	1 Paket	100%	https://drive.google.com/drive/folders/18JQ2kQeKK-dKrqGYXQ_bD21fLXVITmgS?usp=sharing
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Renstra 2024-2026	1 Paket	1 Paket	100%	https://drive.google.com/drive/folders/18JQ2kQeKK-dKrqGYXQ_bD21fLXVITmgS?usp=sharing
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Renstra 2024-2026	1 Paket	1 Paket	100%	https://drive.google.com/drive/folders/18JQ2kQeKK-dKrqGYXQ_bD21fLXVITmgS?usp=sharing
	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Renstra 2024-2026	1 Paket	1 Paket	100%	https://drive.google.com/drive/folders/18JQ2kQeKK-dKrqGYXQ_bD21fLXVITmgS?usp=sharing
	Penyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Renstra 2024-2026	25 Laporan	21 Laporan	84%	https://drive.google.com/file/d/1cPixbGjBf81kpElyc5tNKvEZ234OaQ3q/view?usp=sharing
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Renstra 2024-2026	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	https://drive.google.com/file/d/17aKJmTEGpwQcyj29qngNebTgAaz45TgV/view?usp=sharing
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Renstra 2024-2026**	**76 Unit**	**76 Unit**	**100%**	https://drive.google.com/drive/folders/1gG9--sxZPYfeUhc8cPXT8wPCO2hLW6mE?usp=sharing

	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Renstra 2024-2026	67 Unit	67 Unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1gG9--sxZPYfeUhc8cPXT8wPCO2hLW6mE?usp=sharing
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	Renstra 2024-2026	9 Unit	9 Unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1gG9--sxZPYfeUhc8cPXT8wPCO2hLW6mE?usp=sharing
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Renstra 2024-2026**	**25 Laporan**	**25 Laporan**	**100%**	https://drive.google.com/drive/folders/1KKPP1H6FDUv-MPjMNxX3irR71QRZLAE9?usp=sharing
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Renstra 2024-2026	1 Laporan	1 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1KKPP1H6FDUv-MPjMNxX3irR71QRZLAE9?usp=sharing
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Renstra 2024-2026	12 Laporan	12 Laporan	100%	https://drive.google.com/file/d/1tvieO2DkOSeZOBwVKQkBwfZt2bq59Y3T/view?usp=sharing
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Renstra 2024-2026	12 Laporan	12 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1gmzhjtdGPwo2_0G1GQhHbeP1-TvMmA8p?usp=sharing
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**Renstra 2024-2026**	**145 Unit**	**143 Unit**	**98.62%**	https://drive.google.com/drive/folders/142iWGja6QwaXT3PboTGAzh6Uvl8traGg?usp=sharing
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Renstra 2024-2026	4Unit	3 Unit	75 %	https://drive.google.com/drive/folders/142iWGja6QwaXT3PboTGAzh6Uvl8traGg?usp=sharing

	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Renstra 2024-2026	74 Unit	74 Unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/142iWGja6QwaXT3PboTGAzh6Uvl8traGg?usp=sharing
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	Renstra 2024-2026	66 Unit	65 Unit	99%	https://drive.google.com/drive/folders/142iWGja6QwaXT3PboTGAzh6Uvl8traGg?usp=sharing
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya YangDipelihara/Direhabilitasi	Renstra 2024-2026	1 Unit	1 Unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/142iWGja6QwaXT3PboTGAzh6Uvl8traGg?usp=sharing
1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan**	**Renstra 2024-2026**	**86**	**87.69**	**98%**	https://drive.google.com/drive/folders/142iWGja6QwaXT3PboTGAzh6Uvl8traGg?usp=sharing
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN TERTIB**	**Renstra 2024-2026**	**95%**	**66%**	**69%**	https://drive.google.com/drive/folders/142iWGja6QwaXT3PboTGAzh6Uvl8traGg?usp=sharing
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Renstra 2024-2026**	**4 Laporan**	**2 Laporan**	**50%**	https://drive.google.com/drive/folders/1u1nNI49GHQ3kHum977IJ6y-l-g_Mfa8j?usp=sharing
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Renstra 2024-2026	4 Laporan	2 Laporan	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1u1nNI49GHQ3kHum977IJ6y-l-g_Mfa8j?usp=sharing

	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Renstra 2024-2026**	**2 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	https://drive.google.com/drive/folders/18oVeycZCzOSsjqh90J5j6CmVBQwWSjqq?usp=sharing
	Koordinasi / Sinergi Dengan perangkat daerah dan / Instansi Vertikal yang terkait dala pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Renstra 2024-2026	2 Laporan	1 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/18oVeycZCzOSsjqh90J5j6CmVBQwWSjqq?usp=sharing
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**Renstra 2024-2026**	**6 Laporan**	**5 Laporan**	**83 %**	https://drive.google.com/drive/folders/1GNQdei7MQmtfxoO-WGvbS8-VcuPFQc30?usp=sharing
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Renstra 2024-2026	6 Laporan	5 Laporan	83 %	https://drive.google.com/drive/folders/1GNQdei7MQmtfxoO-WGvbS8-VcuPFQc30?usp=sharing
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR**	**Renstra 2024-2026**	**95 %**	**100%**	**105%**	https://drive.google.com/drive/folders/1YXqi1ktnzNAMcJCxuU3ZdPNCrnDTTCcP?usp=sharing
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan**	**Renstra 2024-2026**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**100%**	https://drive.google.com/drive/folders/1YXqi1ktnzNAMcJCxuU3ZdPNCrnDTTCcP?usp=sharing

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Renstra 2024-2026	21 Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga Kemasyarakatan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1YXqi1ktnzNAMcJCxuU3ZdPNCrnDTTCcP?usp=sharing
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Renstra 2024-2026	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1YXqi1ktnzNAMcJCxuU3ZdPNCrnDTTCcP?usp=sharing
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG**	**Renstra 2024-2026**	**95%**	**80%**	**84%**	https://drive.google.com/drive/folders/1INqAQ7Es1-jImUQSdv5hIMhJ685IfeWj?usp=sharing
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**Renstra 2024-2026**	21 Desa/Kelurahan	17 Desa/Kelurahan	80%	https://drive.google.com/file/d/1SyONqWB8IAIh4A3ZK2hLLQF7l1mLIFkk/view?usp=sharing
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Renstra 2024-2026	21 Desa/Kelurahan	17 Desa/Kelurahan	80%	https://drive.google.com/drive/folders/1MLE8WNrJp29rk4KOEBVmEgUTMXd9s9UV?usp=sharing
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegitan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Renstra 2024-2026	21 Desa/Kelurahan	17 Desa/Kelurahan	80%	https://drive.google.com/drive/folders/1MLE8WNrJp29rk4KOEBVmEgUTMXd9s9UV?usp=sharing

2	**Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Renstra 2024-2026**	**15%**	**62.50%**	**156%**	https://drive.google.com/drive/folders/1MLE8WNrJp29rk4KOEBVmEgUTMXd9s9UV?usp=sharing
	PROGRAM KOORDINASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PERSENTASE PERMASALAHAN TRANTIBUM YANG DIKOORDINASIKAN PENANGANANNYA DENGAN FORKOPIMCAM SERTA TOGA/TOMAS**	**Renstra 2024-2026**	**95 %**	**100%**	**105%**	https://drive.google.com/file/d/1EW48DOPbboIC49EthHVSqbe-arYGGC_m/view?usp=sharing
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Renstra 2024-2026**	**15 Laporan**	**15 Laporan**	**100%**	https://drive.google.com/drive/folders/1wY5zUCKrLNltS5kp5P-jiOOSgaDQnmCI?usp=sharing
	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	15 Laporan	15 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1wY5zUCKrLNltS5kp5P-jiOOSgaDQnmCI?usp=sharing
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PERSENTASE LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT YANG AKTIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN**	**Renstra 2024-2026**	**21 Lembaga /Organisasi Masy.**	**21 Lembaga /Organisasi Masy**	**100%**	https://drive.google.com/file/d/1AFqAAUqstDnulTAuqBhjEag5xbFT8ns_/view?usp=sharing

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**	**Renstra 2024-2026**	**21 Lembaga Kemasyarakatan**	**21 Lembaga Kemasyarakatan**	**100%**	https://drive.google.com/drive/folders/1adEjuaoKNH4T4If9dbz9F_gWUYXZ-ZzY?usp=sharing
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Renstra 2024-2026	827 Orang	827 Orang	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1adEjuaoKNH4T4If9dbz9F_gWUYXZ-ZzY?usp=sharing

Lampiran Bukti Dukung:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perenc.	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	**Tujuan : Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**Indeks Sinergitas Kecamatan**	Renstra **2025-2029 (Baseline)**	**75**	**79.70**	**106%**	https://drive.google.com/drive/folders/1yci0W27yAMbhvGqnc5gnt248yFdqYP5i?usp=sharing
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**NILAI SAKIP KECAMATAN**	Renstra **2025-2029 (Baseline)**	**80**	**71.40**	**89.25 %**	https://drive.google.com/drive/folders/1F2J_srbCefOXPwxA2SeonPWaSxJtDtiN?usp=sharing
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.**	Renstra **2025-2029 (Baseline)**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**100 %**	https://drive.google.com/drive/folders/19WpDEmgBipObDFaRwGm-v5g0A5OPTYJs?usp=sharing
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Renstra 2025-2029 (Baseline)	4 Laporan	4 Laporan	100 %	https://drive.google.com/drive/folders/19WpDEmgBipObDFaRwGm-v5g0A5OPTYJs?usp=sharing
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Renstra **2025-2029 (Baseline)**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**100%**	https://drive.google.com/drive/folders/1Sht5sQTzs8Acr8HEvsB07FAWPfqipN2O?usp=sharing
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Renstra 2025-2029 (Baseline)	18 Orang/Bulan	18 Orang/Bulan	100%	https://drive.google.com/file/d/1JslurZNDUoN1CyVvg6cj40RaVuNXsjCF/view?usp=sharing

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Renstra 2025-2029 (Baseline)	1 Laporan	1 Laporan	100%	https://drive.google.com/file/d/1aFciotEXZRnBk-lad2eC-OYKWZfzPZkN/view?usp=sharing
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Renstra 2025-2029 (Baseline)	18 Laporan	18 Laporan	100%	https://drive.google.com/file/d/1ABI05RP1Y-gyWGT-4NCRgvfAkPTs3a83/view?usp=sharing
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Renstra **2025-2029 (Baseline)**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**	https://drive.google.com/drive/folders/15smlU6alQIXhdO8pNlLrUe2nqtTv_p2q?usp=sharing
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	0	0	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	18 Orang	18 Orang	100%	https://drive.google.com/drive/folders/15smlU6alQIXhdO8pNlLrUe2nqtTv_p2q?usp=sharing
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Renstra **2025-2029 (Baseline)**	**6 Dokumen**	**5 Dokumen**	**84%**	https://drive.google.com/drive/folders/181vWBLWZWb3TzNYR8ZzxzmSavO-yTlDm?usp=sharing
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	1 Paket	1 Paket	100%	https://drive.google.com/drive/folders/181vWBLWZWb3TzNYR8ZzxzmSavO-yTlDm?usp=sharing

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	1 Paket	1 Paket	100%	https://drive.google.com/drive/folders/181vWBLWZWb3TzNYR8ZzxzmSavO-yTlDm?usp=sharing
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	1 Paket	1 Paket	100%	https://drive.google.com/drive/folders/181vWBLWZWb3TzNYR8ZzxzmSavO-yTlDm?usp=sharing
	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	1 Paket	1 Paket	100%	https://drive.google.com/drive/folders/181vWBLWZWb3TzNYR8ZzxzmSavO-yTlDm?usp=sharing
	Penyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Renstra 2025-2029 (Baseline)	25 Laporan	21 Laporan	84%	https://drive.google.com/file/d/18sU7J_Bi-Brs6qL4btrUBcznVh8OOkvk/view?usp=sharing
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Renstra 2025-2029 (Baseline)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/folders/181vWBLWZWb3TzNYR8ZzxzmSavO-yTlDm?usp=sharing
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Renstra **2025-2029 (Baseline)**	**76 Unit**	**76 Unit**	**100%**	https://drive.google.com/drive/folders/1QjTiIAVgwomKSxM36OqVcv5qwYUk6kBU?usp=sharing
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	67 Unit	67 Unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1QjTiIAVgwomKSxM36OqVcv5qwYUk6kBU?usp=sharing
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	9 Unit	9 Unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1QjTiIAVgwomKSxM36OqVcv5qwYUk6kBU?usp=sharing

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Renstra 2025-2029 (Baseline)**	**25 Laporan**	**25 Laporan**	**100%**	https://drive.google.com/drive/folders/12lIuAeLnAcMqUU5rzb88ASpJh3AEh-Ef?usp=sharing
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Renstra 2025-2029 (Baseline)	1 Laporan	1 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/12lIuAeLnAcMqUU5rzb88ASpJh3AEh-Ef?usp=sharing
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	12 Laporan	12 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/12lIuAeLnAcMqUU5rzb88ASpJh3AEh-Ef?usp=sharing
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	12 Laporan	12 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/12lIuAeLnAcMqUU5rzb88ASpJh3AEh-Ef?usp=sharing
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**Renstra 2025-2029 (Baseline)**	**145 Unit**	**143 Unit**	**98.62%**	https://drive.google.com/drive/folders/1ZfpHhzbjc1dd_pQ7nqCAjkiU8tiP_W15?usp=sharing
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Renstra 2025-2029 (Baseline)	4Unit	3 Unit	75 %	https://drive.google.com/drive/folders/1ZfpHhzbjc1dd_pQ7nqCAjkiU8tiP_W15?usp=sharing
	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Renstra 2025-2029 (Baseline)	74 Unit	74 Unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1ZfpHhzbjc1dd_pQ7nqCAjkiU8tiP_W15?usp=sharing
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	Renstra 2025-2029 (Baseline)	66 Unit	65 Unit	99%	https://drive.google.com/drive/folders/1ZfpHhzbjc1dd_pQ7nqCAjkiU8tiP_W15?usp=sharing

	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya YangDipelihara/Direhabilitasi	Renstra 2025-2029 (Baseline)	1 Unit	1 Unit	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1ZfpHhzbjc1dd_pQ7nqCAjkiU8tiP_Wl5?usp=sharing
3	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan**	**Renstra 2025-2029 (Baseline)**	**86**	**88.17**	**102%**	https://drive.google.com/drive/folders/1IWqCN712ujgOfTopgOOaD0CyxoaF6R2K?usp=sharing
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN TERTIB**	**Renstra 2025-2029 (Baseline)**	**95%**	**66%**	**69%**	https://drive.google.com/drive/folders/1IWqCN712ujgOfTopgOOaD0CyxoaF6R2K?usp=sharing
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Renstra 2025-2029 (Baseline)**	**4 Laporan**	**2 Laporan**	**50%**	https://drive.google.com/drive/folders/1E1xIRVwpurz6GCAxwVWTNFGlvAFCWJii?usp=sharing
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Renstra 2025-2029 (Baseline)	4 Laporan	2 Laporan	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1E1xIRVwpurz6GCAxwVWTNFGlvAFCWJii?usp=sharing
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Renstra 2025-2029 (Baseline)**	**2 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**https://drive.google.com/drive/folders/1HlcYHpQs49WJuHWOxEMbTe41wT3dDT__?usp=sharing**
	Koordinasi / Sinergi Dengan perangkat daerah dan / Instansi Vertikal yang terkait dala pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Renstra 2025-2029 (Baseline)	2 Laporan	1 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1HlcYHpQs49WJuHWOxEMbTe41wT3dDT__?usp=sharing

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**Renstra 2025-2029 (Baseline)**	**6 Laporan**	**5 Laporan**	**83 %**	https://drive.google.com/drive/folders/1o4jSnFkiktf5g4SYPVGJ3gtTlOqhl92M?usp=sharing
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	6 Laporan	5 Laporan	83 %	https://drive.google.com/drive/folders/1o4jSnFkiktf5g4SYPVGJ3gtTlOqhl92M?usp=sharing
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR**	**Renstra 2025-2029 (Baseline)**	**95 %**	**100%**	**105%**	https://drive.google.com/drive/folders/125c-RfsXJ6Am4qM7VfDTr483KisBvfTv?usp=sharing
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan**	**Renstra 2025-2029 (Baseline)**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**100%**	https://drive.google.com/drive/folders/125c-RfsXJ6Am4qM7VfDTr483KisBvfTv?usp=sharing
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Renstra 2025-2029 (Baseline)	21 Lembaga Kemasyarakatan	21 Lembaga Kemasyarakatan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1awI2_E6LDJhd3UnLETsv1zIRV5sTbqZG?usp=sharing
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1kgJm2GI8JO8lqV-nF3hPVWITa2dLvhal?usp=sharing

4	**Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Renstra 2025-2029 (Baseline)**	**15%**	**37.50%**	**25%**	https://drive.google.com/drive/folders/1qrwDCxLfdMEdAxhdyLU1F_4Zlb2_DO-4?usp=sharing
	PROGRAM KOORDINASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PERSENTASE PERMASALAHAN TRANTIBUM YANG DIKOORDINASIKAN PENANGANANNYA DENGAN FORKOPIMCAM SERTA TOGA/TOMAS**	**Renstra 2025-2029 (Baseline)**	**95 %**	**100%**	**105%**	https://drive.google.com/file/d/1EW48DOPbboIC49EthHVSqbe-arYGGC_m/view?usp=sharing
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Renstra 2025-2029 (Baseline)**	**15 Laporan**	**15 Laporan**	**100%**	https://drive.google.com/drive/folders/1MIuEUZMDBqg-dDYcq4KMtPKafOP6mclX?usp=sharing
	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Renstra 2025-2029 (Baseline)	15 Laporan	15 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1MIuEUZMDBqg-dDYcq4KMtPKafOP6mclX?usp=sharing
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PERSENTASE LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT YANG AKTIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN**	**Renstra 2025-2029 (Baseline)**	**21 Lembaga /Organisasi Masy.**	**21 Lembaga /Organisasi Masy**	**100%**	https://drive.google.com/file/d/1AFqAAUqstDnulTAuqBhjEag5xbFT8ns_/view?usp=sharing

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**	**Renstra 2025-2029 (Baseline)**	**21 Lembaga Kemasyarakatan**	**21 Lembaga Kemasyarakatan**	**100%**	https://drive.google.com/drive/folders/1w6bC3p9mIrQUalhzsZ2pD4kPrjWLx2zN?usp=sharing
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Renstra 2025-2029 (Baseline)	827 Orang	827 Orang	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1w6bC3p9mIrQUalhzsZ2pD4kPrjWLx2zN?usp=sharing
5	**Meningkatnya Tertib Administrasi Desa**	**Presentase Desa Tertib Administrasi Desa**	**Renstra 2025-2029 (Baseline)**	**80%**	**100%**	**125%**	https://drive.google.com/file/d/1SyONqWB8IAIh4A3ZK2hLLQF7l1mLIFkk/view?usp=sharing
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG**	**Renstra 2025-2029 (Baseline)**	**95%**	**80%**	**84%**	https://drive.google.com/file/d/1SyONqWB8IAIh4A3ZK2hLLQF7l1mLIFkk/view?usp=sharing
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**Renstra 2025-2029 (Baseline)**	21 Desa/Kelurahan	17 Desa/Kelurahan	80%	https://drive.google.com/file/d/1SyONqWB8IAIh4A3ZK2hLLQF7l1mLIFkk/view?usp=sharing
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Renstra 2025-2029 (Baseline)	21 Desa/Kelurahan	17 Desa/Kelurahan	80%	https://drive.google.com/drive/folders/1Sx_9PfAmOnyEYwXKWMYXI3pYhqFWASYF?usp=sharing

	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegitan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Renstra 2025-2029 (Baseline)	21 Desa/Kelurahan	17 Desa/Kelurahan	80%	https://drive.google.com/drive/folders/1Sx_9PfAmOnyEYwXKWMYXI3pYhqFWASYF?usp=sharing